



SEPAKAT

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, ANALISIS,
PEMANTAUAN & EVALUASI KEMISKINAN TERPADU



MODUL PENGANTAR SEPAKAT

Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi
dan Analisis Kemiskinan Terpadu

#KebijakanKemiskinanBerbasisBuktiDiUjungJari

MODUL PENGANTAR SEPAKAT

Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi
dan Analisis Kemiskinan Terpadu

UNTUK PESERTA

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas

MODUL PENGANTAR SEPAKAT

Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi
dan Analisis Kemiskinan Terpadu

Pengarah : Pungky Sumadi
Editor : Maliki
Tim Penulis : Widaryatmo
Bambang Suharnoko S
Ahmad Hariyadi
Bahtiar Fitanto
Dianty Ayu Shintadewi
Heracles Lang
Maudytia Rismalasari P
Mercoledi N. Nasiir
Michelle Khoe
Muhamad Chehafudin
Muhamad Farhan
Oki Sembiring
Purri Andriaty
Y. Heru S

ISBN No. : 978-602-52841-5-1

Desain dan
isi Sampul : Tim KOMPAK

Diterbitkan oleh:
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng, Jakarta Pusat
www.bappenas.go.id

Cetakan Pertama, Desember 2020

Tidak untuk diperjualbelikan

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Tidak diperkenankan untuk mencetak,
memperbanyak dan lan sebagainya dalam bentuk apapun tanpa izi tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan isu prioritas yang harus ditangani oleh semua sektor dan pihak. Target kemiskinan di tingkat Nasional disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan di tingkat daerah disahkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tahun 2018, kemiskinan satu digit menjadi sebuah jargon untuk angka kemiskinan terendah yang sudah tercapai selama kurang lebih 20 tahun. Penurunan kemiskinan yang terus terjadi setiap tahunnya menunjukkan Indonesia semakin Menuju Bebas Kemiskinan.

Namun, penurunan kemiskinan tidak terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Berbagai permasalahan terkait kemiskinan secara moneter dan multidimensi masih menyelimuti hampir seluruh daerah. Tantangan-tangan yang dihadapi setiap daerah dengan dilengkapi Indonesia sebagai negara kepulauan dan banyak budayanya mengartikan kemiskinan di Indonesia beda akar masalahnya. Kemiskinan satu digit yang didengungkan sejak tahun 2018, tidak berarti apabila kemiskinan di tingkat daerah masih dirasakan banyak daerah.

Berbagai strategi yang telah dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah cenderung kepada penurunan beban dan peningkatan pendapatan yang juga sesuai dengan RPJMN 2020 - 2024. Namun, langkah strategi yang inovatif perlu dikembangkan seiring dengan kemajuan teknologi berbasis 4.0. Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Analisis Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat untuk digunakan baik untuk tingkat pusat, daerah, maupun stakeholder lainnya untuk percepatan penurunan kemiskinan. Keluaran yang dihasilkan oleh SEPAKAT berupa materi dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah yang *pro-poor* sehingga kebijakan yang diusulkan tepat guna dan tepat sasaran.

Pemanfaatan SEPAKAT telah dirasakan oleh beberapa pemerintah pusat dan daerah baik untuk penyusunan dokumen perencanaan maupun alat analisis lainnya. Fungsi SEPAKAT yang didasari oleh teknologi juga memberikan perubahan kepada cara membuat kebijakan berbasis bukti dan data serta perubahan dalam kapasitas sumberdaya manusianya. Pada akhirnya, kemiskinan satu digit tidak hanya terasa di tingkat Nasional saja melainkan di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia serta tercapainya *Zero Poverty*.

Untuk mempermudah pengguna memahami bagian-bagian yang ada di dalam SEPAKAT, Tim SEPAKAT menyusun Modul Pengantar SEPAKAT. Nantinya, modul ini akan dijadikan sebagai panduan pengguna dalam menggunakan aplikasi SEPAKAT.

**Deputi Bidang Kependudukan danKetanagakerjaan
Kementerian PPN/Bappenas**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Bab 1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan	3
1.3 Manfaat.....	4
Bab 2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	5
2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Indonesia	7
2.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional	9
2.3 Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional dan Daerah.....	10
2.4 Data Dalam Penanggulangan Kemiskinan	11
Bab 3. Modul Analisis SEPAKAT	13
3.1 Mengapa Analisis di Tingkat Daerah?	15
Tingkat Kemiskinan Daerah Sangat Beragam	15
Kerentanan yang Tinggi.....	16
Ketimpangan yang Tajam.....	16
3.2 Pendekatan dan Metode SEPAKAT.....	17
3.3 Konsep dan Definisi	19
Apa perbedaan Kuintil, Desil, dan Persentil?	19
Kurva Insiden Pertumbuhan.....	19
Koefisien Gini	19
Idleness	19
3.4 Sumber Data	20
3.5 Rangkuman (<i>Highlight/Overview</i>)	20
3.6 Modul dan Indikator.....	21
3.7 Prioritisasi	24
Kenapa Prioritisasi?.....	24
Mekanisme Prioritisasi	24
3.8 Ringkasan Kemiskinan (<i>Poverty Brief</i>)	27

Bab 4. Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Masyarakat Miskin.....29

4.1	Modul Perencanaan	31
4.1.1.	Latar Belakang.....	31
	4.1.2. Konsep dan Definisi.....	33
4.1.3.	Mekanisme Dan Alur Perencanaan dan Penganggaran Daerah	34
4.1.4.	Analisis Perencanaan Menggunakan SEPAKAT	35
4.1.5.	Prasyarat Penggunaan Aplikasi Perencanaan dalam SEKAPAT	37
4.2	Modul Penganggaran.....	38
4.2.1.	Latar Belakang.....	38
2.	Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin.....	41
3.	Prasyarat Penggunaan Aplikasi Penganggaran dalam SEPAKAT	44

Bab 5. Proses Monitoring & Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.....47

1.	Landasan Hukum Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan	49
1.	Tujuan dan Manfaat Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan	50
5.1.2.	Komponen Kunci Monitoring dan Evaluasi Yang Baik	50
5.1.3.	Pengertian Monitoring dan Evaluasi	51
5.2	Analisis Monitoring dan Evaluasi Menggunakan SEPAKAT	53
1.	Skema Modular Monitoring dan Evaluasi di Aplikasi SEPAKAT.....	53
2.	Modular Monitoring dan Evaluasi di Aplikasi SEPAKAT	54
	Modul Evaluasi	60
5.3.1	Efek Pertumbuhan.....	61
5.3.2	Efek Redistribusi	62
5.3.3	<i>Normalised Poverty Bias of Growth (Normalised PBG)</i>	64
5.3.4	Konsep Penurunan Kemiskinan.....	65

Bab 6. Manajemen Pengetahuan.....69

6.1	Latar Belakang	71
6.2	Definisi dan Konsep Manajemen Pengetahuan	71
6.3	Manajemen Pengetahuan SEPAKAT.....	74
	Kegiatan Penciptaan Pengetahuan (<i>Knowledge Creation</i>)	74
	Kegiatan Berbagi Pengetahuan (<i>Knowledge Sharing</i>)	75
	Kegiatan Penerapan Pengetahuan (<i>Knowledge Implementing</i>).....	76

BAB 1

Pendahuluan



1.1 LATAR BELAKANG

Berbagai langkah besar dan inovatif telah ditempuh Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Sebanyak 40 juta penduduk berhasil keluar dari kemiskinan sejak tahun 2006. Namun dalam enam tahun terakhir terjadi perlambatan penurunan kemiskinan dengan laju penurunannya sebesar 2.25% tahun 2013 – 2019. Di sisi lain tingkat ketimpangan pengeluaran mengalami penurunan secara perlahan sejak tahun 2014 yang mengindikasikan adanya perbaikan pemerataan pendapatan bagi masyarakat dengan 40% berpendapatan terendah dan menengah. Selain itu, selama satu tahun terakhir rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan yang ditandai oleh penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) serta semakin mengecilnya ketimpangan diantara penduduk miskin yang ditandai oleh penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Hal ini mengartikan, terdapat peningkatan aktivitas yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru dan dampak dari peningkatan arus uang yang beredar di daerah dikarenakan perguliran dana desa yang berpengaruh terhadap distribusi pendapatan di daerah. Di sisi lain, terdapat penurunan pada daya beli dan semakin tertinggalnya masyarakat miskin.

Dengan demikian, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan perlu upaya yang inovatif secara sistematis, holistik, integratif dan spasial. Program-program nasional dan daerah juga perlu dirancang untuk menysasar akar permasalahan kemiskinan dan kantong-kantong kemiskinan secara fokus dan tepat. Pemikiran dan rancangan program yang *'out of the box'* untuk dapat mengurai *bottleneck* dalam permasalahan kemiskinan serta kerjasama pemerintah pusat dan daerah perlu didorong untuk menjamin percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan yang lebih efektif.

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menegaskan bahwa penguatan partisipasi masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut Bappenas telah berupaya mengembangkan berbagai inovasi untuk mendukung peningkatan kapasitas pemerintah daerah termasuk diantaranya melalui program *Pro-poor Planning, Budgeting dan Monitoring* (P3BM) dan SIMPADU (Sistem Informasi Terpadu). Melalui P3BM telah dibangun program peningkatan kapasitas pemerintah daerah agar dapat memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran agar dapat lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat miskin. Sementara itu, melalui SIMPADU diharapkan peningkatan peran pemerintah daerah untuk dapat mengelola data dan memonitor program-program kemiskinan secara cepat dan dinamis menggunakan aplikasi berbasis web. Inovasi-inovasi ini ditujukan untuk mendukung pemerintah daerah selaku aktor kunci dalam pembangunan dan percepatan pengurangan kemiskinan daerah, terutama melalui perbaikan sistem dan mekanisme perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan.

Hal ini sejalan dengan perkembangan terkini dengan memanfaatkan sistem dan aplikasi untuk mengumpulkan berbagai data secara optimal. Salah satu pemanfaatannya adalah sebagai input bagi perumusan kebijakan program dan pengambilan keputusan pemerintah. Kebutuhan akan data dan penggunaannya sudah disadari dan diidentifikasi dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menyebutkan khususnya dalam rangka pelaksanaan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui terwujudnya pengendalian penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan sasaran persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka pelaksanaan strategi program secara holistik, tematik, integratif dan spasial maka pada tahun 2016 telah dikembangkan sistem yang mendukung pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu bernama SEPAKAT. Analisis yang dihasilkan dari SEPAKAT dapat dirancang untuk proses perencanaan dan penganggaran daerah berbasis bukti dan data sehingga perumusan program kemiskinan menysasar kantong-kantong kemiskinan secara tepat sasaran. Selain untuk memperkaya diagnosa analisis kemiskinan serta perumusan prioritas program kemiskinan, Bappenas juga membangun kerjasama dengan Sistem *Sub-National Poverty Assessment* (SNAPA) yang dikembangkan Bank Dunia dengan tujuan untuk memberdayakan pemerintah daerah menganalisis kemiskinan dan meningkatkan inovasi dalam pembuatan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti di tingkat daerah.

Integrasi sistem ini diharapkan juga dapat menghasilkan suatu instrumen yang secara sistematis dapat menyempurnakan basis data dan analisis kemiskinan untuk proses perencanaan dan penganggaran yang pro-poor, penguatan proses monitoring dan evaluasi yang terukur melalui peningkatan kapasitas aparatur dan peran kelembagaan yang menangani pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di daerah.

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pemerintah dan kelembagaan daerah, pelaksanaan pelatihan SEPAKAT di tingkat nasional dan daerah akan dipandu dengan empat (4) serial modul pelatihan yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu:

1. Modul Pengantar SEPAKAT
2. Panduan Pengguna SEPAKAT
3. Panduan Pemanfaatan SEPAKAT
4. Modul Pelatihan Bagi Pelatih SEPAKAT

Buku Modul Pengantar SEPAKAT ini bertujuan untuk memberikan panduan referensi dan membangun kerangka pikir pengguna dalam melakukan analisis berbasis bukti dan data yang valid sebagai basis dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi menggunakan SEPAKAT.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari hasil pengajaran modul Pengantar SEPAKAT ini, diantaranya adalah:

1. Memperoleh informasi terkait kondisi kemiskinan di Indonesia dan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan Nasional.
2. Memiliki pemahaman menyeluruh terkait perannya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
3. Memiliki pengetahuan pentingnya memanfaatkan data dalam merumuskan kebijakan dan program terkait penanggulangan kemiskinan.
4. Memiliki perubahan paradigma dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.
5. Memahami pentingnya konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program-program terkait kemiskinan.

1.3 MANFAAT

Manfaat yang diharapkan melalui modul ini adalah pemahaman menyeluruh bagi peserta terkait permasalahan kemiskinan terkini penyusunan perencanaan, penganggaran yang berbasis data dan analisis menggunakan SEPAKAT.

BAB 2

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan



PETUNJUK PEMBELAJARAN

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN



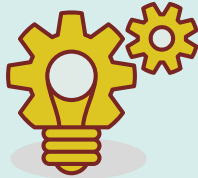
TUJUAN:

Peserta pelatihan memiliki pemahaman terkait kondisi kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia



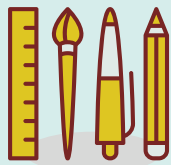
WAKTU:

1 X 45 Menit



METODE:

- Ceramah
- Curah Pendapat



MEDIA:

- LCD Projector
- Laptop/Komputer



SUMBER REFERENSI:

- Bahan Paparan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- Bahan Paparan Pengantar SEPAKAT
- Lembar Kerja Pelatihan



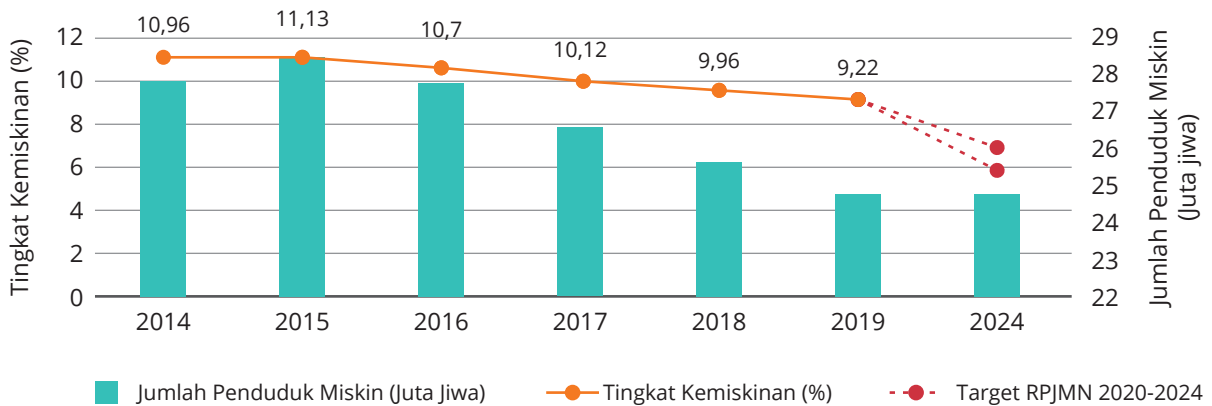
HANDOUT:

- Presentasi PowerPoint
- Handout

2.1 KONDISI UMUM KEMISKINAN INDONESIA

Dalam kurun beberapa tahun terakhir, penurunan kemiskinan di Indonesia tidak menunjukkan pergeseran yang signifikan. Laju penurunan kemiskinan sejak 5 tahun terakhir terjadi perlambatan yang sejak tahun 2014 tidak pernah lebih dari 0.6% per tahun bahkan terjadi peningkatan di tahun 2015. Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, masih terdapat sekitar 27.7 juta (BPS, 2019) penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Grafik 1).

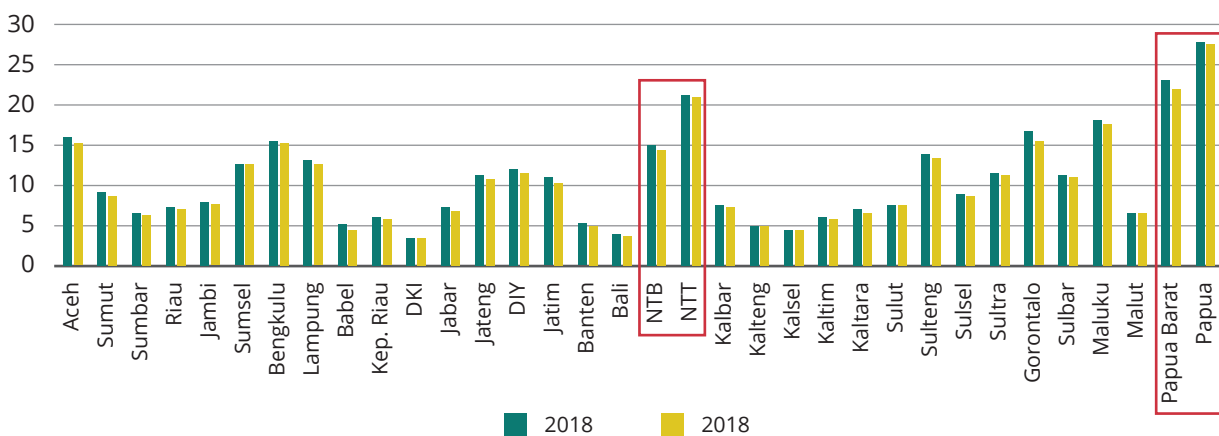
GRAFIK 1. TINGKAT PENDUDUK MISKIN NASIONAL (2014-2019)



Sumber: BPS September, 2014 - 2019

Kondisi kemiskinan di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan antar wilayah yang ditandai dengan masih tingginya selisih tingkat kemiskinan, pencapaian hasil-hasil pembangunan, akses terhadap pelayanan dasar, kualitas pekerjaan, tingkat pendapatan baik di perdesaan dan perkotaan, antar wilayah, antar kawasan maupun wilayah tertinggal atau perbatasan. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa menurut data BPS tahun 2019, kemiskinan di Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah timur Indonesia seperti Papua (27,53%), Papua Barat (22,17%) dan NTT (21,09%).

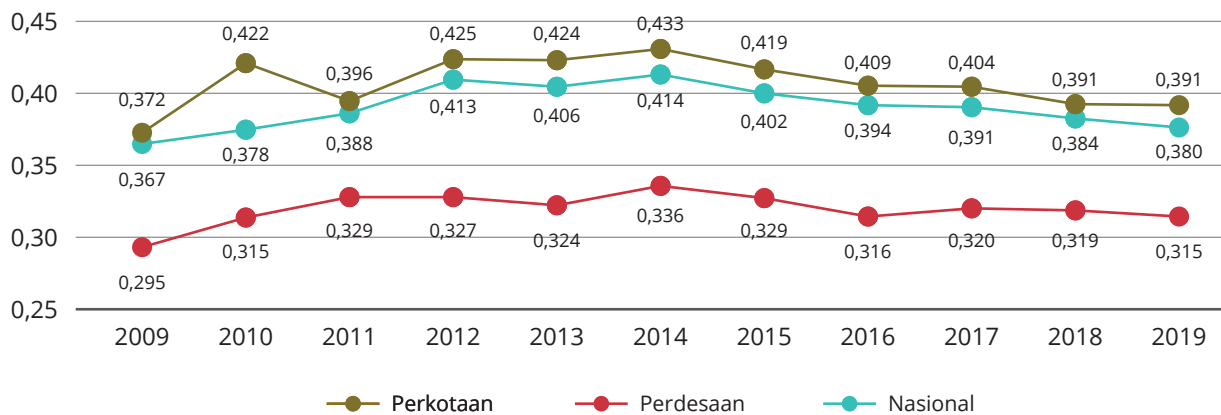
GRAFIK 2. GRAFIK KEMISKINAN ANTAR WILAYAH TAHUN 2018 - 2019



Sumber: BPS, 2018 - 2019

Selain itu, terdapat stagnasi pada pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat dengan kesejahteraan 40% terbawah yang ditandai oleh angka koefisien Gini sebesar 0,41 sejak tahun 2011-2015. Namun penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia menjadi 0,38 pada September 2019 yang sebelumnya sebesar 0,384 pada September 2018 yang artinya terdapat perbaikan tingkat pemerataan pendapatan seperti yang tertera pada Grafik 4. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di perkotaan sebesar 0.315 dan di perdesaan sebesar 0.391.

GRAFIK 3. GINI RASIO (INDEKS) PER-SEPTEMBER 2017



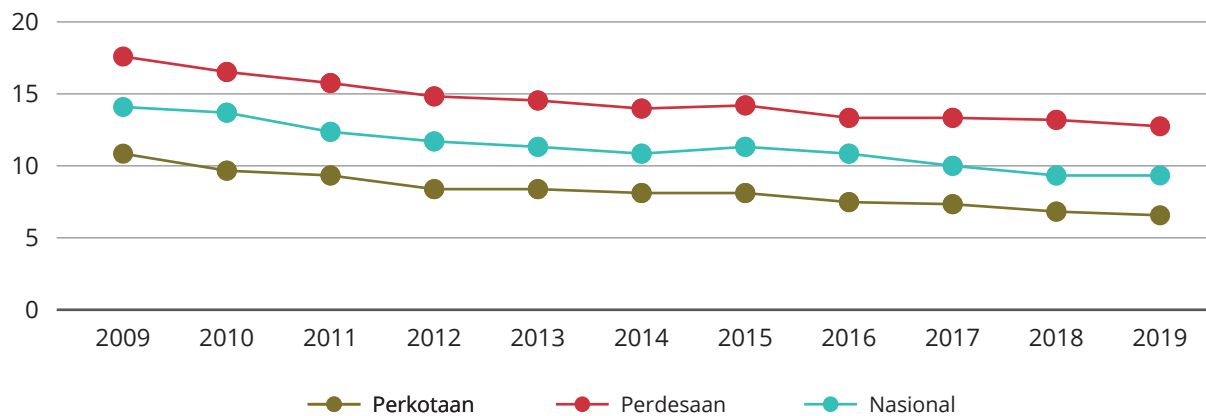
Sumber: BPS, 2009 - 2019

Beberapa penyebab penurunan ketimpangan diantaranya adalah meningkatnya upah harian buruh tani dan upah harian buruh bangunan dibandingkan tahun sebelumnya dan peningkatan kegiatan-kegiatan yang memicu arus pergerakan uang di daerah dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun masih terdapat perdebatan mengenai korelasi langsung antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, namun nilai koefisien gini 0,391 masih menggambarkan ketimpangan tingkat sedang bagi kelompok dengan pendapatan terendah dibanding dengan kelompok pendapatan tertinggi. Seperti dilansir dalam laporan Bank Dunia tahun 2016¹ yang mengungkapkan terdapat peningkatan kesenjangan ekonomi secara signifikan di Indonesia karena hanya 20% dari penduduk dengan pendapatan tertinggi di Indonesia yang dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi selama satu dekade terakhir, sementara 80% lainnya (sekitar 200 juta penduduk) tidak ikut merasakannya.

Kondisi lain yang terjadi juga adalah tingkat kemiskinan dan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan data kemiskinan BPS sejak tahun 2009 – 2019 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan selalu lebih besar dari pada di perkotaan. Selain itu laju penurunan kemiskinan di perdesaan juga cenderung semakin melambat (Grafik 4). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal salah satunya dikarenakan lebih maraknya pembangunan dan penciptaan lapangan kerja di perkotaan, lalu dengan meningkatnya inflasi terkait komoditas makanan di perdesaan yang lebih tinggi dibanding di perkotaan yang menyebabkan peningkatan Garis Kemiskinan (GK) perdesaan. Hal-hal ini juga yang dapat disinyalir sebagai beberapa faktor penyebab peningkatan indeks kedalaman kesmiskinan (PO) dan indeks keparahan kemiskinan yang terjadi selama satu tahun terakhir ini.

¹ Indonesia's Rising Divide (2016, World Bank)

GRAFIK 4. GRAFIK PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN



Sumber: BPS, 2009 - 2019

Isu lainnya yang perlu diwaspadai adalah, meningkatnya jumlah penduduk miskin baru di Indonesia, berdasarkan data BPS tahun 2016 tercatat 55,57% dari jumlah penduduk miskin merupakan orang miskin baru. Hal ini disebabkan dari jumlah penduduk yang masuk kategori rentan miskin semakin meningkat. Ada beberapa penyebab dari hal ini yaitu sejumlah penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan masuk ke dalam kategori rentan dan dapat sewaktu-waktu kembali jatuh miskin saat terjadi guncangan, selain itu jumlah penduduk yang tidak miskin dan masuk ke dalam kategori rentan semakin meningkat dikarenakan beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial.

2.2 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL

Penanganan kemiskinan dan ketimpangan secara tegas telah ditetapkan melalui transformasi strategi penanggulangan kemiskinan dengan ditetapkannya tiga pilar strategi dengan target yang terukur di dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Implementasi dari tiga strategi yang mencakup 1) isu perlindungan sosial, 2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, dan 3) pengembangan penghidupan berkelanjutan harus dipertajam dengan langkah-langkah akseleratif yang tidak hanya berlandaskan pada data dan fakta yang akurat (*evidence based*), tetapi juga perlu didukung dengan analisis kemiskinan yang komprehensif, kerangka kebijakan dan kelembagaan yang kuat, serta regulasi yang lebih *pro-poor*.

Dalam perkembangannya, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan secara makro fokus kepada beberapa aspek dalam upaya mendorong pemerataan seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menjaga stabilitas makro, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, memperbaiki regulasi perdagangan, mendorong produktivitas pertanian dan pengembangan infrastruktur wilayah tertinggal. Sementara di sisi kebijakan mikro difokuskan kepada upaya pengurangan beban melalui penyediaan akses terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial lalu dari sisi peningkatan pendapatan melalui berbagai peningkatan akses untuk mendukung peningkatan penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin (Grafik 5).

GRAFIK 5. **GRAFIK PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (RKP 2018)**



www.bappenas.go.id

2.3 ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN DAERAH

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan sebelumnya dan dalam era desentralisasi ini, kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama yang menentukan keberhasilan percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, terutama melalui perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut, UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menegaskan bahwa penguatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai komponen penting di daerah dalam proses pembangunan telah dikenali sebagai pendekatan kunci dalam pencapaian perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada rakyat miskin.

Dalam rangka melaksanakan mandat tersebut diperlukan sumber daya dan kapasitas dalam merencanakan program dan kegiatan yang secara spesifik dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Diantaranya melalui kegiatan yang mencakup bantuan-bantuan sosial ekonomi, perbaikan akses dan kesempatan bagi masyarakat miskin dan rentan untuk menerima layanan pendidikan dan kesehatan, kebijakan pengembangan infrastruktur dan keterampilan bagi angkatan kerja. Dalam memahami permasalahan kemiskinan baik pemerintah nasional dan daerah perlu mempertimbangkan perkembangan sosial, ekonomi, politik yang terjadi. Jika dibutuhkan pemrograman ulang atau *refocusing* prioritas program perlu dilakukan demi tercapainya hasil yang diinginkan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

Kelembagaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan juga perlu dipertegas dan didorong efektivitasnya. Meskipun kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan penanganan secara holistik dan lintas sektor, tetapi saat ini terdapat beberapa institusi yang dimandatkan untuk mengambil peran terdepan dalam mengkoordinir upaya pengurangan kemiskinan di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang sudah dibentuk sejak tahun 2011 melalui Perpres 15/2011 dengan mandat sebagai koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah. Struktur organisasi TKPK diatur dalam Permendagri 42/2011 yang memerlukan dukungan penuh agar efektivitas program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dapat tercapai dan terukur. TKPK harus diperkuat agar dapat memegang kendali dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh masing-masing OPD dan memiliki peran dalam memantau kemajuan dan pencapaian program-program kemiskinan. TKPK juga harus diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan pengumpulan dan validasi data terkait kemiskinan yang dibutuhkan bagi pembangunan yang *pro-poor* (optimalisasi fungsi dan peran Pokja Pendataa dan Sistem Informasi pada TKPKD). Selain itu TKPK diharapkan dapat mendorong kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam halnya pengumpulan data dan melakukan analisa kemiskinan sebagai masukan perumusan kebijakan dan perencanaan serta penganggaran yang berpihak bagi masyarakat miskin.

2.4 DATA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan tepat sasaran perlu didukung oleh data yang menggambarkan letak permasalahan secara akurat dan menentukan target sasaran program secara tepat, sehingga rumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana secara lebih efektif.

Hal ini juga didukung oleh Perpres No. 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020 – 2024 terkait strategi penanggulangan kemiskinan yang menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perlu didukung oleh **data yang valid dan sistem informasi yang terpadu dengan memanfaatkan data kemiskinan terpadu serta instrumen perencanaan, penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada masyarakat miskin.**

Data kemiskinan merupakan cikal bakal analisis kemiskinan yang menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah terutama dari sisi penentuan program/ kegiatan dan perumusan target sasaran yang tepat dan terukur. Berdasarkan data yang valid dan akurat maka proses pengambilan keputusan dalam rangka menentukan sasaran program/ kegiatan dan target penerima manfaat dapat terlaksana secara lebih terarah dan efektif.

Data yang baik juga dapat mendorong konsistensi program pembangunan secara horizontal (antara sasaran kegiatan dalam perencanaan dan alokasi dana pada penganggaran) dan vertikal (antara kebijakan program pusat dan daerah maupun). Sehingga data merupakan suatu alat informasi yang sangat *'powerful'* dalam menentukan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat rentan dan miskin sehingga perlu dikelola dengan baik.

Data yang digunakan untuk perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan saat ini adalah:

a) Data BPS

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan pakaian, makanan, perumahan, kondisi kesehatan dan pendidikan, ketenagakerjaan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Saat ini susenas terbagi menjadi dua kategori variable yaitu Kor (inti) dan Modul (rinci).
- Potensi Desa (Podes) merupakan data berbasis wilayah untuk menggambarkan keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi wilayah di level desa di seluruh Indonesia yang meliputi aspek sarana dan prasarana, potensi ekonomi, sosial, budaya dan menyediakan data dasar kewilayahan yang diambil setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk mendukung kegiatan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi.
- **Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)** merupakan data yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan untuk memperoleh informasi jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.
- **Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** merupakan data yang memberikan informasi tentang kondisi perekonomian tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

b) Data Kementerian Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang memuat nama dan alamat penduduk atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dari tingkat paling rendah sampai 40 persen penduduk/ rumah tangga di Indonesia.

c) Data Kementerian Keuangan

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan data yang memberikan informasi terkait keuangan tahunan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

d) Data Sektor

Data ini merupakan data yang dihasilkan oleh masing-masing kementerian teknis dan/atau daerah baik untuk kebutuhan penanggulangan kemiskinan maupun untuk kebutuhan pembangunan dan kebutuhan movev program. Contoh: Kementerian Sosial (Data Kelompok Fakir Miskin, Data PMKS), Kementerian Pendidikan (Profil Pendidikan), dan Kementerian Kesehatan (Profil Kesehatan).

e) Data Program

Data ini merupakan data yang terkait program prioritas pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah dan dapat terbagi per sektor/ organisasi. Beberapa contoh data program di tingkat nasional adalah data yang terkait dengan program Rastra (Beras Sejahtera), PKH (Program Keluarga Harapan), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat, KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan lain-lain. Untuk di tingkat daerah beberapa program yang mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah adalah Grindulu Mapan (Pacitan), Anggur Merah (NTT) , Jamses Ratu (Banten), dll.

BAB 3

Modul Analisis SEPAKAT



PETUNJUK PEMBELAJARAN MODUL ANALISIS



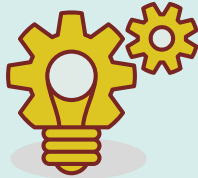
TUJUAN:

Peserta pelatihan memiliki pemahaman bagaimana menganalisis kondisi/profil kemiskinan di daerah, agar lebih tepat guna dan sasaran.



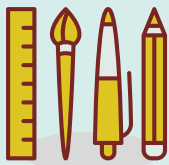
WAKTU:

2 X 45 Menit



METODE:

- Ceramah
- Curah Pendapat



MEDIA:

- LCD Projector
- Laptop/Komputer



SUMBER REFERENSI:

- Bahan Paparan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
- Bahan Paparan Pengantar SEPAKAT
- Lembar Kerja Pelatihan



HANDOUT:

- Presentasi PowerPoint
- Handout

3.1 MENGAPA ANALISIS DI TINGKAT DAERAH?

Karena dalam era desentralisasi pemerintah daerah mengelola lebih dari 40% belanja publik dan bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar yang penting untuk pengentasan kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan. Indonesia telah berhasil mengurangi angka kemiskinan hingga satu digit, sejak krisis ekonomi 1998/1999 hingga menjadi 9.41% di tahun 2019. Akan tetapi laju penurunan kemiskinan makin melambat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan anti kemiskinannya untuk mempercepat laju penurunan kemiskinan nasional.

Siapakah mereka yang miskin? Jika tingkat konsumsinya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik.

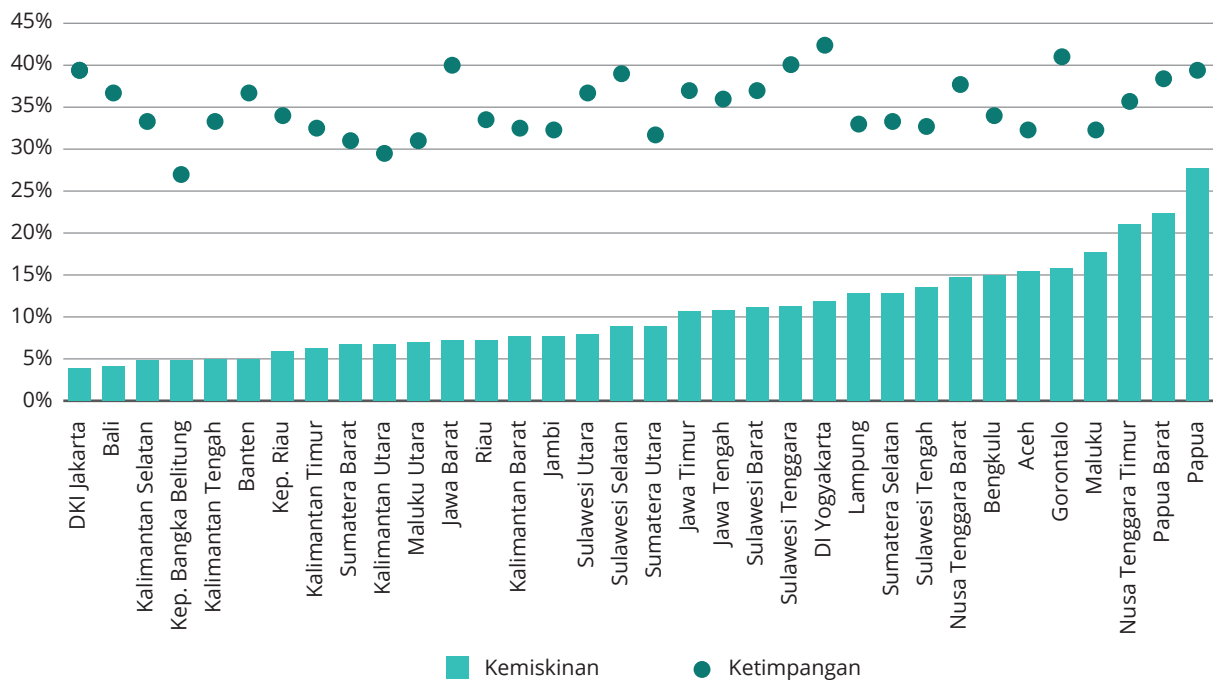


TINGKAT KEMISKINAN DAERAH SANGAT BERAGAM

Ada kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan di bawah 5%, akan tetapi masih banyak kabupaten/kota yang masih memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 10%. Beberapa daerah di belahan Timur Indonesia memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dengan beberapa kabupaten di Papua memiliki tingkat kemiskinan lebih dari 30%. Dibutuhkan kebijakan daerah yang beragam pula untuk mengatasinya.

KERENTANAN YANG TINGGI

GRAFIK 6. TINGKAT KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PROVINSI, 2019

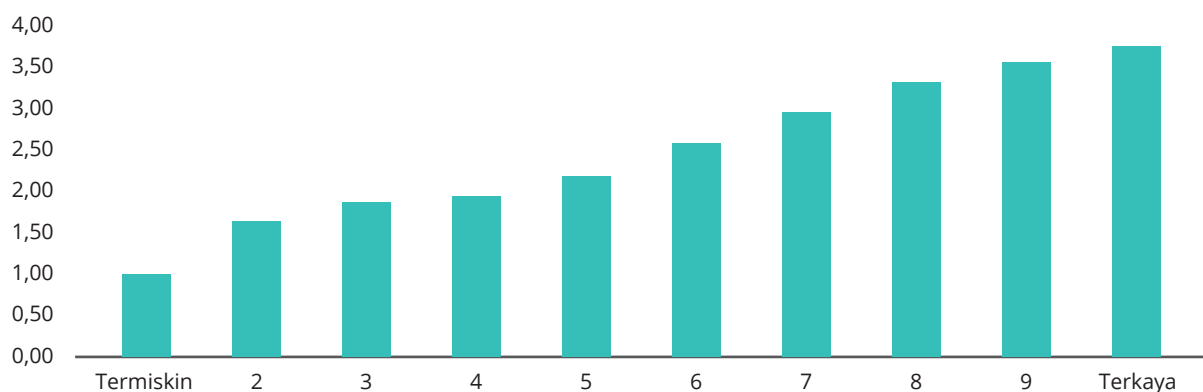


Sumber: BPS, 2019

Sekitar hampir 30% penduduk Indonesia memiliki tingkat pengeluaran antara garis kemiskinan dan 1.5 X garis kemiskinan. Kondisi kehidupan mereka tidak jauh berbeda dengan mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Karena itu mereka rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan jika terjadi hal-hal diluar dugaan seperti sakit, pemutusan hubungan kerja, krisis ataupun bencana. Lebih dari sepertiga kabupaten/kota memiliki lebih dari 40% orang yang miskin dan rentan di daerah mereka.

KETIMPANGAN YANG TAJAM

GRAFIK 7. KURVA INSIDEN PERTUMBUHAN

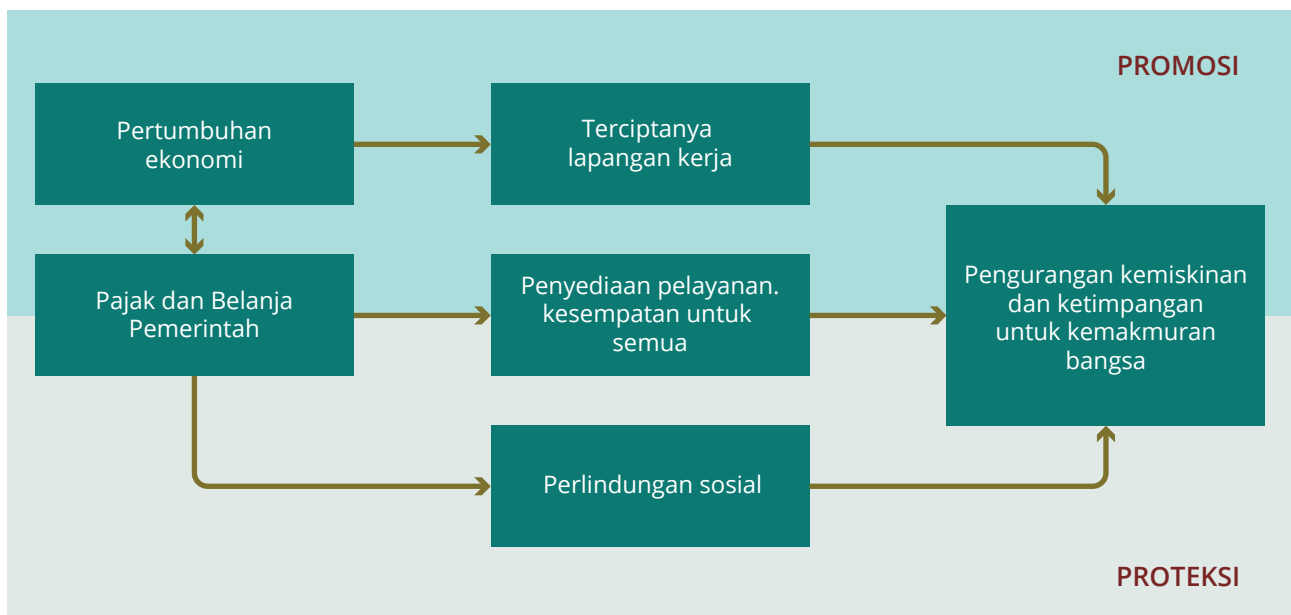


Sumber: SUSENAS 2008-2018 dan Hasil Analisis Tim SEPAKAT

Dilihat dari koefisien Gini, Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang relatif tinggi di Asia. Pertumbuhan rata-rata tahunan penduduk 40% termiskin dalam 10 tahun terakhir hanya sekitar 13-14%. Jauh dibawah 10% terkaya yang tumbuh hampir dua kali lipatnya dalam periode waktu yang sama.

3.2 PENDEKATAN DAN METODE SEPAKAT

Ada dua strategi kunci yang harus dimiliki daerah untuk mengatasi kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan yaitu: strategi promosi dan strategi proteksi. Strategi promosi untuk mengangkat mereka yang miskin menjadi diatas garis kemiskinan dan strategi proteksi untuk menjaga supaya mereka yang sudah diatas garis kemiskinan tidak menjadi miskin kembali.



Kedua strategi tersebut dapat diterjemahkan menjadi lima pertanyaan strategis untuk analisis kemiskinan dalam lima langkah:

1) Bagaimana kondisi kemiskinan dan kerentanan? Mengapa mereka yang miskin dan rentan tertinggal?

Memahami kondisi kemiskinan dan kerentanan secara relatif maupun absolut dengan menggunakan berbagai ukuran kemiskinan dan kerentanan.

2) Apakah mereka yang miskin dan rentan bekerja?

Modul Ketenagakerjaan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi tenaga kerja sebuah daerah. Modul ini berisi indikator-indikator umum seperti jumlah penduduk bekerja, tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk idle, nilai tambah per pekerja, dan lain-lain. Akan tetapi modul ini juga memuat indikator baru seperti penduduk idle.

Modul Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan berisi indikator-indikator yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin dan rentan, serta bagaimana perbandingannya dengan penduduk yang lebih sejahtera.

3) Apakah mereka yang miskin dan rentan terlayani?

Modul Kemiskinan dan Ketimpangan menyajikan indikator-indikator kemiskinan dan ketimpangan dasar.

Modul Akses Miskin dan Rentan menyediakan analisis karakteristik orang miskin dan rentan berdasarkan akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

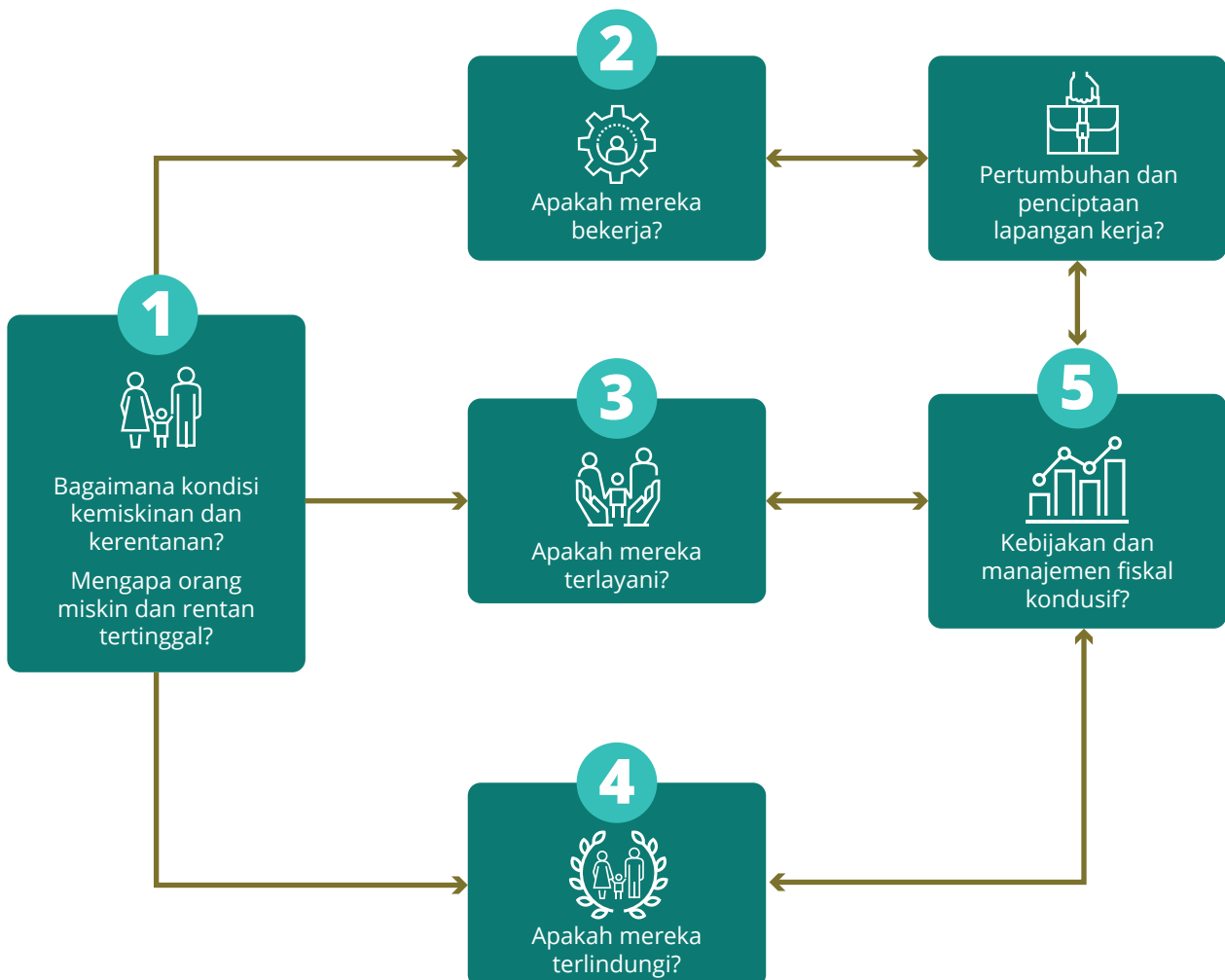
Modul Partisipasi M&R dalam Pelayanan Publik berisi indikator-indikator yang menjelaskan karakteristik umum anggota rumah tangga dan/atau rumah tangga, seperti jenis kelamin, kelompok usia dan pendidikan tertinggi. Modul ini bertujuan untuk memberikan gambaran siapakah penduduk miskin dan rentan itu, serta apakah mereka berbeda dengan penduduk kaya.

4) Apakah mereka yang miskin dan rentan terlindungi?

Modul Perlindungan Sosial berisi indikator-indikator yang menjelaskan apakah anggota rumah tangga dan/atau rumah tangga memiliki perlindungan sosial kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.

5) Apakah kondisi perekonomian dan fiskal mendukung pengentasan kemiskinan?

Pemerintah daerah memiliki dua instrumen penting: kebijakan perundangan dan kebijakan anggaran. Modul-modul di kelompok ini menyajikan analisis-analisis untuk melihat kondisi perekonomian dan fiskal suatu daerah.



3.3 KONSEP DAN DEFINISI

APA PERBEDAAN KUINTIL, DESIL, DAN PERSENTIL?

Kalau kuintil membagi penduduk menjadi 5 bagian, desil membagi penduduk menjadi 10 bagian, dan persentil membagi penduduk menjadi 100 bagian. Mengapa bisa begitu? Karena kuintil (atau yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *quintile*) berasal dari kata *quint*, yang artinya lima. Kemudian desil (atau yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *decile*) berasal dari kata *deca*, yang artinya sepuluh. Sedangkan persentil (atau yang dalam Bahasa Inggris dikenal sebagai *percentile*) berasal dari kata *percent*, yang artinya seratus.

Untuk mempelajari lebih lanjut, Anda dapat mengakses tautan berikut: <https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Kuintil>

KURVA INSIDEN PERTUMBUHAN

Kurva yang sering dikenal sebagai Growth Incidence Curve ini, mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan masing-masing kelompok kesejahteraan (kuintil, desil, persentil, dll) dalam dua titik waktu atau tahun. SEPAKAT menggunakan desil sebagai kelompok kesejahteraan rumah tangga. Melalui kurva insiden pertumbuhan, ketimpangan pertumbuhan antar kelompok kesejahteraan dapat dibandingkan, sehingga dapat dianalisis apakah rumah tangga kaya semakin jauh meninggalkan rumah tangga miskin.

KOEFISIEN GINI

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

IDLENESS

Idleness adalah pengelompokan Aktivitas Ekonomi dan Sosial Anggota Rumah Tangga (ART) yang menunjukkan apakah kegiatan yang dilakukannya produktif secara ekonomi. Berdasarkan International Labor Organization (ILO), *idleness* didefinisikan sebagai *Not Employed, in Education or in Training* (NEET), atau tidak sedang bekerja, sekolah atau pelatihan. *Idleness* memiliki dua klasifikasi, yaitu:

- *Idle*: ART tidak sedang bekerja atau sekolah
- Tidak *Idle*: ART sedang bekerja atau sekolah

Baik dalam Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas) maupun Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tidak disertakan pertanyaan mengenai partisipasi dalam pelatihan. Sehingga, definisi partisipasi pelatihan tidak digunakan untuk *idleness* dalam perangkat SEPAKAT.

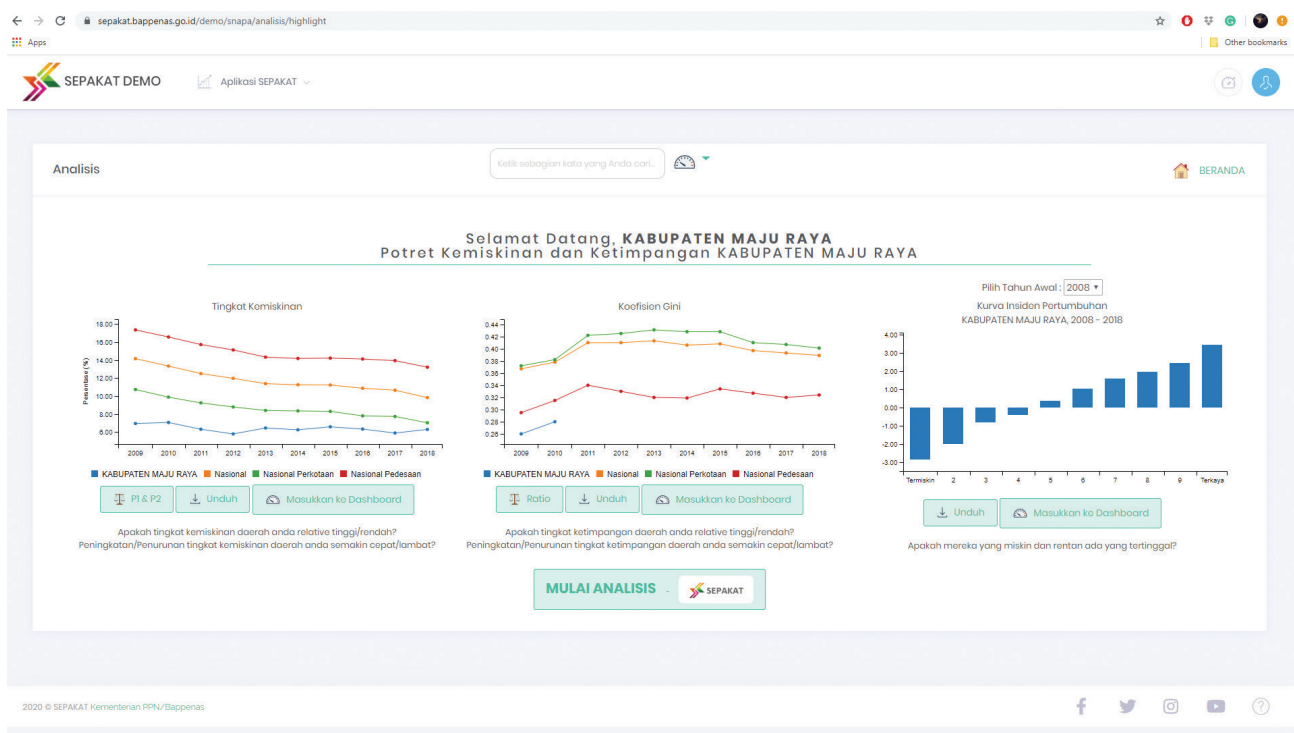
3.4 SUMBER DATA

Pada modul analisis, data yang digunakan mencakup:

1. survei nasional BPS, yaitu Susenas dan Sakernas;
2. sensus nasional BPS, yaitu Podes;
3. publikasi BPS, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
4. Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial; dan
5. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dari Kementerian Keuangan.

Saat ini, tim SEPAKAT juga sudah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperkaya data di SEPAKAT. Hingga saat ini, kedua pihak masih berdiskusi dengan Bappenas untuk mengakomodir data yang dibutuhkan.

3.5 RANGKUMAN (HIGHLIGHT/OVERVIEW)



Sebelum masuk ke halaman modul dan indikator, pengguna akan diarahkan ke halaman rangkuman. Merujuk pada langkah pertama kerangka pikir SEPAKAT, halaman ini merangsang pengguna untuk menganalisis kondisi kemiskinan di daerahnya, serta mendorongnya untuk menggali akar permasalahan bagaimana orang miskin dan rentan bisa tertinggal di daerahnya. Tiga grafik disajikan dalam halaman ini, yaitu:

1. **Tingkat Kemiskinan**, untuk menganalisis tingkat kemiskinan di daerahnya apabila dibandingkan dengan tingkat daerah di atasnya;

2. **Koefisien Gini**, untuk mengukur tingkat ketimpangan di daerahnya apabila dibandingkan dengan tingkat daerah di atasnya; dan
3. **Kurva Insiden Pertumbuhan**, untuk mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan untuk masing-masing kelompok desil selama 10 tahun.

Tingkat Kemiskinan, atau yang juga dikenal sebagai **Ukuran Kemiskinan**, memiliki tiga indikator, yaitu:

- **Tingkat Kemiskinan (P0)**: proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.
- **Kedalaman Kemiskinan (P1)**: rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis kemiskinan.
- **Keparahan Kemiskinan (P2)**: rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita.

Turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin.

Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Kurva Insiden Pertumbuhan membandingkan ketimpangan pertumbuhan antar kelompok kesejahteraan, untuk menganalisis apakah rumah tangga kaya semakin jauh meninggalkan rumah tangga miskin.

3.6 MODUL DAN INDIKATOR

Setelah mengakses halaman rangkuman, pengguna akan diarahkan ke halaman modul. Modul analisis SEPAKAT terdiri atas beberapa modul dan indikator yang didasarkan atas 4 pertanyaan utama dari kerangka pikir SEPAKAT:

1. Apakah mereka bekerja?

Merujuk pada langkah ke-2 kerangka pikir SEPAKAT, pengguna dapat menganalisis secara mendalam bagaimana komposisi penduduk yang bekerja, menganggur, maupun idle di daerahnya.

a. Modul Ketenagakerjaan

Berisi data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Modul ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kondisi tenaga kerja sebuah daerah.

b. **Modul Kesempatan Kerja untuk Miskin dan Rentan**

Berisi indikator-indikator yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan penduduk miskin dan rentan, serta bagaimana perbandingannya dengan penduduk yang lebih sejahtera.

2. **Apakah mereka terlayani?**

Setelah memahami komposisi penduduk yang bekerja, pengguna dapat menuju langkah ke-3 kerangka pikir SEPAKAT, yaitu menganalisis apakah kondisi pelayanan publik di daerahnya sudah merata dan terpenuhi.

a. **Modul Kemiskinan dan Ketimpangan**

Menyajikan indikator-indikator kemiskinan dan ketimpangan dasar. Semua indikator dalam modul ini bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas). Semua indikator dalam modul ini dihitung menggunakan pengeluaran per kapita.

b. **Modul Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik**

Memberikan informasi mengenai kemudahan penduduk miskin dan rentan untuk mengakses fasilitas dan infrastruktur dasar yang penting bagi kehidupan mereka. Modul ini ditujukan untuk memberikan gambaran apakah terdapat keterbatasan atau ketimpangan akses yang dialami oleh penduduk miskin dan rentan, serta apakah pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah selama ini sudah menyentuh mereka yang miskin dan rentan. Dengan informasi yang dihasilkan oleh modul ini, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan yang lebih baik dalam pembangunan fisik agar dampak pembangunannya dapat dirasakan oleh penduduk miskin dan rentan. Modul ini dianalisis dengan menggunakan data Potensi Desa (Podes) yang dipadukan dengan data Survei Sosioekonomi Nasional (Susenas).

c. **Modul Partisipasi Miskin dan Rentan dalam Pelayanan Publik**

Menyajikan indikator-indikator yang menunjukkan karakteristik dasar penduduk atau rumah tangga miskin dan hasil manfaat akses terhadap pelayanan publik. Modul ini bertujuan untuk melakukan analisis apakah penduduk atau rumah tangga miskin dan rentan sudah memperoleh manfaat dari ketersediaan fasilitas dan infrastruktur dasar yang dibahas di modul Akses Miskin dan Rentan ke Pelayanan Publik. Dengan menggabungkan hasil analisis modul ini dengan modul akses ke pelayanan publik tersebut, maka dapat dilakukan analisis apakah permasalahan yang terjadi di antara penduduk atau rumah tangga miskin terdapat pada kurang terjangkaunya fasilitas dan infrastruktur dasar (sisi penawaran) atau pada partisipasi mereka terhadap fasilitas dan infrastruktur dasar tersebut (sisi permintaan).

3. **Apakah mereka terlindungi?**

Setelah memahami kondisi pelayanan publik di daerahnya, pengguna dapat menuju langkah ke-4 kerangka pikir SEPAKAT, yaitu menganalisis apakah perlindungan sosial di daerahnya sudah merata dan terpenuhi.

a. **Modul Perlindungan Sosial**

Berisi indikator-indikator yang menunjukkan kepemilikan rumah tangga terhadap program perlindungan sosial tertentu. Modul ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa terlindungi rumah tangga miskin di daerah tertentu dan apakah program-program perlindungan sosial sudah diberikan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Analisis dengan menggunakan modul ini dapat menjadi input perencanaan program perlindungan sosial beserta ukuran programnya yang diperlukan untuk membantu penduduk miskin.

b. **Modul Penerima Bantuan**

Menyajikan data 40% penduduk termiskin se-Indonesia (desil 1 hingga 4) dalam sistem basis data terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data tersebut disajikan dalam dua kategori: rumah tangga (RT) dan anggota rumah tangga (ART).

4. **Apakah kondisi ekonomi dan fiskal mendukung?**

Selain memahami komposisi penduduk yang bekerja, serta kondisi pelayanan publik dan perlindungan sosial, pengguna juga perlu menganalisis apakah kondisi fiskal di daerahnya sudah menunjang. Salah satu yang perlu dipertimbangkan, yaitu bagaimana pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja di daerahnya bisa berkontribusi secara signifikan pada pendapatan daerah.

a. **Modul Kondisi Perekonomian**

Berisi data Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah. Modul ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menganalisa sektor mana yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di daerah terkait.

b. **Modul Kondisi Fiskal**

Menyediakan analisis mengenai komposisi alokasi keuangan daerah berdasarkan sektor dan klasifikasi ekonomi. Analisis- analisis ini dapat melihat seberapa besar kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemberian pelayanan publik yang merata.

c. **Modul Ekonomi Produktif**

Sesuai pengertian RPJMN, modul ekonomi produktif memuat analisis untuk membuat penduduk di daerah, utamanya kelompok miskin dan rentan, agar lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Modul ini mencoba menganalisis bagaimana perekonomian menyerap tenaga kerja, sehingga dapat memberikan indikasi peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas, peluang usaha, dan permodalan.

Melalui berbagai modul analisis yang disajikan, harapannya pemerintah daerah dapat mengeksplorasi berbagai indikasi dan menemukan akar permasalahannya, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam merencanakan program dan kegiatan yang lebih tepat guna dan sasaran.

3.7 PRIORITISASI

Fitur prioritas dapat membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas isu kemiskinan dan ketimpangan di daerahnya. Fitur ini disajikan dalam bentuk scorecard, yang diberi warna merah, kuning, atau hijau. Indikasi warna ini didasarkan atas tinggi rendahnya tingkat ketimpangan dan kemiskinan di daerahnya.

KENAPA PRIORITISASI?

Pemerintah Daerah seringkali dihadapi oleh banyak permasalahan, terutama terkait kemiskinan dan ketimpangan, yang dialami penduduk di daerahnya. Padahal, Pemerintah Daerah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggulangi semua permasalahan tersebut dalam sekali waktu. Di saat seperti ini, prioritas untuk memilih penanggulangan isu harus dilakukan. Namun, bagaimana sebaiknya menentukan prioritas tersebut? Tim SEPAKAT mencoba menjawab permasalahan ini dengan membuat Fitur Prioritisasi. Fitur ini dibuat untuk membantu pengguna melakukan prioritas isu untuk diintervensi, berdasarkan:

1. **Ketimpangan antara kelompok penduduk miskin dan kaya dalam pencapaian indikator tertentu**

Seringkali Pemerintah Daerah menemukan kasus di mana suatu permasalahan sosioekonomi hanya dialami oleh kaum relatif miskin saja, dan tidak dialami masyarakat yang relatif kaya. Kasus seperti ini tentu akan memperparah kondisi kaum relatif miskin, dan Pemerintah Daerah perlu mengintervensi hal ini segera. Fitur ini menyajikan prioritas untuk semua permasalahan yang unik dialami oleh kelompok penduduk relatif miskin.

2. **TPB/SPM**

Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Indonesia telah ditetapkan menjadi komitmen nasional, dan komitmen untuk keduanya sudah memiliki dasar hukum yang mengikat.

3. **Selisih Absolut**

Pemerintah Daerah juga bisa menemukan kasus di mana tidak ada diskriminasi antara kaum miskin dan kaya dalam mengalami permasalahan sosioekonomi. Filter ini digunakan untuk menentukan prioritas untuk semua permasalahan tanpa dibatasi oleh ketimpangan.

MEKANISME PRIORITISASI

Pengaturan ranking pada fitur prioritas didasarkan atas beberapa aspek, yaitu seberapa besar jarak capaian terhadap target yang ditetapkan, seberapa besar tingkat ketimpangan antara kelompok termiskin dan terkaya, apakah indikator tersebut banyak dialami oleh orang miskin dan rentan, dan berapa jumlah individu yang mengalaminya (besaran/bobotnya).

Terdapat 31+29 indikator yang terpilih dalam prioritas, berasal dari 5 sektor pembangunan (Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Infrastruktur Rumah Tangga, dan Perlindungan Sosial), yang datanya tersedia dan representatif secara statistik terhadap daerah tersebut.

31 indikator terpilih adalah indikator umum, sedangkan 29 indikator adalah indikator dari SPM dan TPB yang memiliki target pencapaian nasional yang sudah ditentukan berdasarkan hukum.

Urutan dalam prioritas ditentukan berdasarkan skor, dengan formula sebagai berikut:

$$skor_x = 1 - \left(\sum_{i \in \{0, target\}} X_i \times W_i \right), i = [1, n]$$

Di mana:

- $skor_x$ adalah skor prioritas untuk indikator capaian x .
- i menyatakan setiap individu dari subpopulasi tertentu. Nilai i dapat berada di antara 1 sampai n , dengan menyatakan estimasi populasi tertentu dari subpopulasi tersebut.
- x_i adalah status capaian individu i untuk indikator capaian x . Nilai x_i dapat berupa 0 (belum memenuhi capaian indikator) dan 1 (sudah memenuhi capaian indikator).
- $X_{i \in \{0, target\}}$ adalah total nilai x_i di dalam kelompok tertentu. Nilai x_i dapat berada di antara 0 dan $target$.
- $target$ adalah nilai maksimum yang diharapkan untuk pencapaian indikator capaian x . Target untuk indikator capaian umum bernilai 100%, sedangkan target untuk indikator capaian SPM dan TPB dapat bernilai di bawah itu, sesuai dengan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan indikator capaian tersebut.
- Informasi target nilai untuk indikator capaian SPM dan TPB dapat dilihat pada halaman wiki masing-masing indikator capaian.
- w_i adalah bobot yang diberikan untuk setiap individu i , berdasarkan pengeluaran relatif individu i .
- Pengeluaran relatif ditentukan berdasarkan pengeluaran individu i (ditulis dengan y_i dibagi total pengeluaran seluruh individu di daerah tersebut (ditulis dengan $\sum \frac{y_i}{y}$)).
- Rumus pengeluaran relatif dapat disederhanakan secara matematis menjadi $\frac{1}{y_i}$ yaitu 1 dibagi pengeluaran individu i .

Implikasi utama dari mekanisme perhitungan skor prioritas SEPAKAT adalah penduduk miskin (mempunyai pengeluaran yang relatif rendah) dianggap berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk kaya (mempunyai pengeluaran yang relatif tinggi). Jumlah penduduk miskin di daerah pengguna yang belum memenuhi indikator capaian mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk kaya.

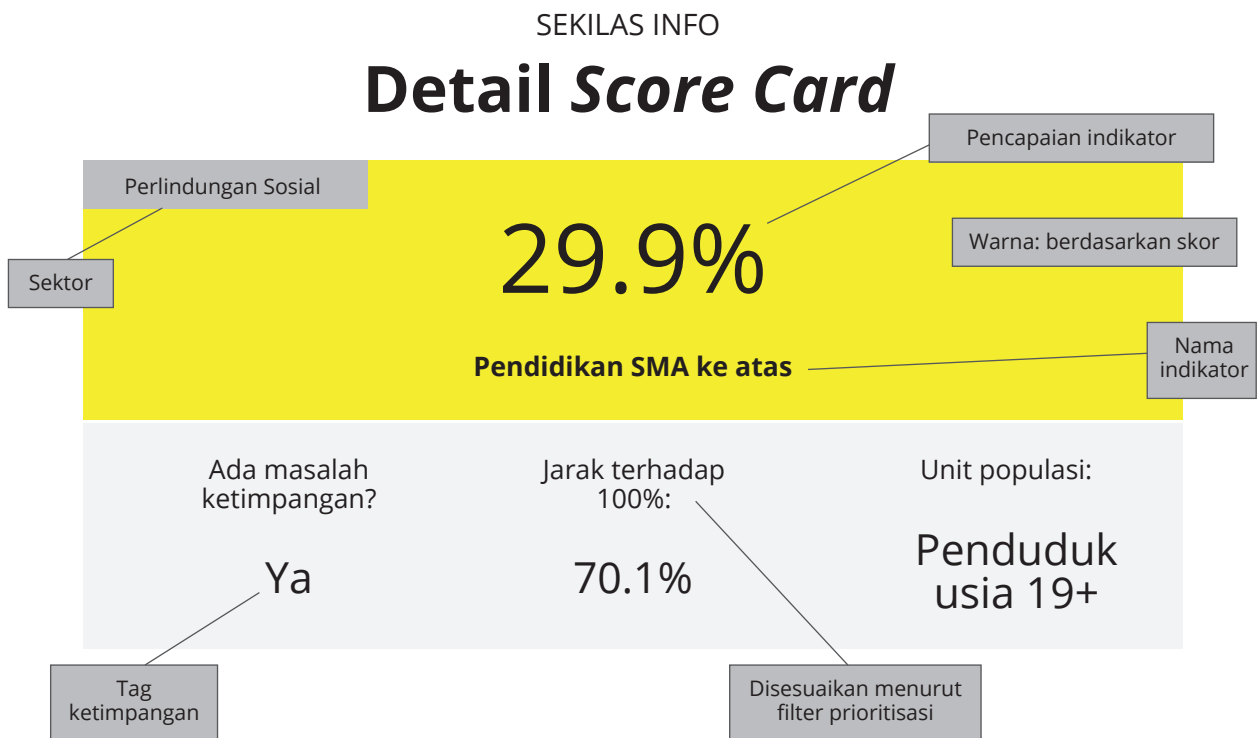
Implikasi lainnya dari mekanisme perhitungan adalah, perhitungan skor dapat dimodifikasi sesuai target pencapaian. Hal ini berguna untuk menghitung skor pada indikator-indikator SPM dan TPB, di mana masing-masing indikator memiliki target yang sudah ditentukan sebelumnya dalam dasar hukum yang kuat (Perpres/RPJMD).

Hasil skor kemudian digolongkan menjadi 3 tahap prioritas:

- Prioritas rendah (ditandai hijau): $0.7 \leq \text{skor} < 1$
- Prioritas sedang (ditandai kuning): $0.3 \leq \text{skor} \leq 0.7$
- Prioritas utama (ditandai merah): $0 < \text{skor} \leq 0.3$

Kemudian hasil prioritisasi disajikan dalam bentuk scorecard yang memiliki warna dominan dan memuat informasi ringkas terkait indikator tersebut.

Contoh *scorecard* adalah sebagai berikut:



Perhitungan indikator capaian dan skor prioritisasi didasarkan pada data mentah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan di bulan Maret setiap tahunnya.

SUSENAS adalah survei yang dilaksanakan setiap dua kali setahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS RI), yang tujuan utamanya adalah mengukur kondisi sosioekonomi penduduk yang representatif terhadap daerah di Indonesia. Keterangan lebih lanjut mengenai masing-masing wave dari SUSENAS, seperti desain pengambilan sampel dan rentang pengumpulan data, dapat diakses di laman Mikrodata SUSENAS.

Salah satu isu utama dari penggunaan data survei adalah representativitas sampel data survei terhadap daerah yang menjadi subjek penelitian. Tim SEPAKAT telah mengakomodasi isu tersebut dengan hanya menampilkan hasil skor prioritas yang memiliki nilai relative standard error (RSE) di bawah 25%. Statistik RSE sendiri dihitung oleh Tim SEPAKAT dengan memperhitungkan desain sampel SUSENAS, demi mendapatkan nilai yang akurat.

3.8 RINGKASAN KEMISKINAN (POVERTY BRIEF)

Sedangkan fitur ringkasan kemiskinan membantu pemerintah daerah untuk mendapat ringkasan terhadap isu kemiskinan dan ketimpangan di daerahnya. Fitur ini berisi grafik dan narasi untuk 3 diagram di halaman rangkuman (*highlight/overview*), serta ditambah beberapa isu dari halaman prioritas.

Aplikasi SEPAKAT

Analisis

BERANDA
HIGHLIGHT
MODUL

**KABUPATEN MAJU RAYA
TAHUN 2018**

POVERTY BRIEF
(c) SEPAKAT 2020

Tingkat kemiskinan KABUPATEN MAJU RAYA pada tahun 2018 adalah sebesar 6,28%. Nilai ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,40%. Tingkat kemiskinan KABUPATEN MAJU RAYA tahun 2018 dibawah tingkat kemiskinan nasional. Sebagai daerah yang didominasi daerah pedesaan, tingkat kemiskinan KABUPATEN MAJU RAYA sudah lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional khusus daerah pedesaan.

**Ukuran Kemiskinan
Tingkat Kemiskinan (Po)
Tahun 2009 - 2018 (Publikasi)
Pembangunan - Kabupaten Maju Raya**

Tahun	KABUPATEN MAJU RAYA	Nasional	Nasional Periurban	Nasional Pedesaan
2009	6.5	14.0	10.5	17.5
2010	6.5	13.5	10.0	16.5
2011	6.0	12.5	9.5	15.5
2012	6.0	12.0	9.0	15.0
2013	6.5	11.5	8.5	14.5
2014	6.5	11.5	8.5	14.5
2015	6.5	11.5	8.5	14.5
2016	6.0	11.0	8.0	14.0
2017	6.0	10.5	7.5	13.5
2018	6.28	10.0	7.0	13.0

Sayangnya, BPS Pusat tidak mengeluarkan data Koefisien Gini dari daerah KABUPATEN MAJU RAYA. Silakan menghubungi kantor BPS setempat untuk meminta hasil perhitungan data Gini di daerah KABUPATEN MAJU RAYA.

**Koefisien Gini
Tahun 2009 - 2018 (Publikasi)
Pembangunan - Kabupaten Maju Raya**

Tahun	KABUPATEN MAJU RAYA	Nasional	Nasional Periurban	Nasional Pedesaan
2009	0.28	0.37	0.37	0.29
2010	0.29	0.38	0.41	0.32
2011	0.34	0.40	0.42	0.34
2012	0.33	0.40	0.42	0.33
2013	0.32	0.40	0.42	0.32
2014	0.32	0.40	0.42	0.32
2015	0.33	0.40	0.42	0.33
2016	0.33	0.40	0.42	0.33
2017	0.32	0.39	0.41	0.32
2018	0.32	0.38	0.40	0.32

Secara rata-rata, pengeluaran per kapita penduduk KABUPATEN MAJU RAYA dari tahun 2008 ke tahun 2018 tumbuh sebesar 0,4729 %. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam 3,611 % penduduk KABUPATEN MAJU RAYA tumbuh di bawah rata-rata. Pertumbuhan pengeluaran per kapita antara penduduk berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah relatif sangat timpang, di mana penduduk 10% termiskin (desil 1) hanya bertumbuh sebesar -2,8757 %, sementara penduduk 10% terkaya tumbuh hingga 3,4518 %.

**Kurva Insiden Pertumbuhan
KABUPATEN MAJU RAYA, 2008 - 2018**

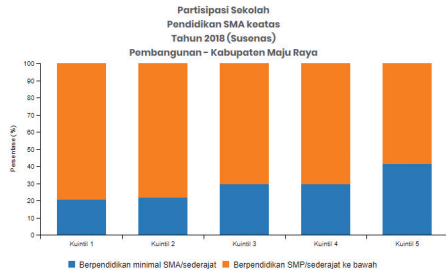
Tingkat pengangguran terbuka KABUPATEN MAJU RAYA pada tahun 2018 adalah sebesar 1,43%. Nilai ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,58%, yang artinya jumlah penganggur terbuka meningkat sejumlah 145,771 orang. Lebih dari itu, tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir.

**Penduduk Menganggur Terbuka
Tahun 2009 - 2018 (Sakernas)
Pembangunan - Kabupaten Maju Raya**

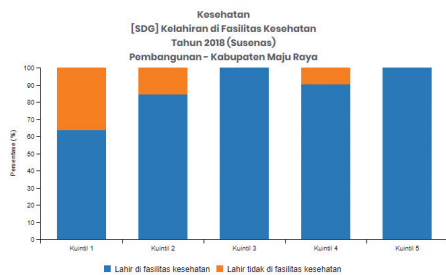
Tahun	Tingkat Partisipasi Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Inti
2010	0.88	0.88
2011	1.55	1.15
2012	1.05	0.90
2013	1.00	0.88
2014	1.05	0.95
2015	0.95	0.95
2016	0.90	0.85
2017	0.85	0.85
2018	1.43	1.43

Modul Pengantar SEPAKAT

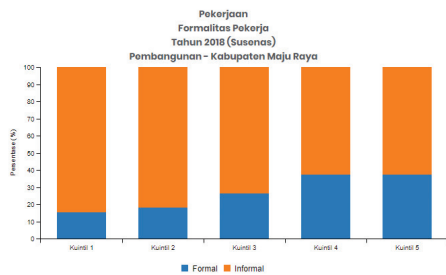
27



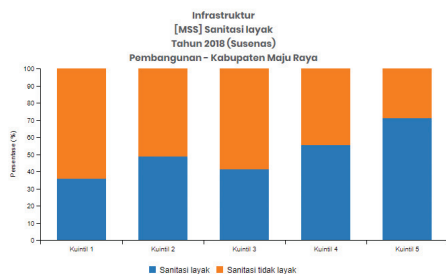
Indikator Pendidikan minimal SMA ke atas merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Pendidikan, dengan capaian sebesar 31,0%. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 20,4% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 41,33%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.



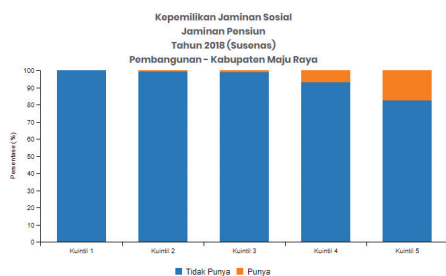
Indikator [TPB] kelahiran di Faskes merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator kesehatan, dengan capaian sebesar 27,40%. Padahal indikator ini memiliki target yang harus dicapai, ditentukan dari peraturan mengenai SPM/SDG indikator ini masih 57,60% di bawah target SPM/SDG sehingga patut menjadi perhatian lebih. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 8,63% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 100,00%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.



Indikator Status pekerjaan, formal/informal merupakan indikator dengan capaian paling rendah serta memiliki potensi ketimpangan, dengan capaian sebesar 55,70%. Indikator ini harus menjadi perhatian karena capaian umumnya belum cukup optimal. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 15,41% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 37,58%. Dari sisi sektor pekerjaan, mayoritas tenaga kerja di KABUPATEN MAJU RAYA bekerja dalam sektor Lainnya. Proporsi sektor pekerjaan di daerah ini cenderung homogen berdasarkan kelompok pengeluaran.



Indikator [SPM] Sanitasi Layak merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Hunian Sosial, dengan capaian sebesar 68,40%. Padahal indikator ini memiliki target yang harus dicapai, ditentukan dari peraturan mengenai SPM/SDG indikator ini masih 68,40% di bawah target SPM/SDG, sehingga patut menjadi perhatian lebih. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 35,90% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 71,07%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.



Indikator kepemilikan pensiun merupakan indikator dengan capaian paling rendah di antara indikator-indikator Perlindungan Sosial, dengan capaian sebesar 7,80%. Lebih dari itu, indikator ini mengalami masalah ketimpangan di mana penduduk 20% termiskin hanya memiliki capaian 0,00% sementara penduduk 20% terkaya sudah mencapai 17,44%, sehingga penduduk miskin harus diprioritaskan untuk penyelesaian masalah.

BAB 4

Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Masyarakat Miskin



PETUNJUK PEMBELAJARAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN



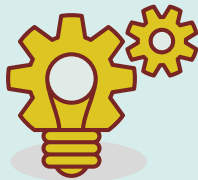
TUJUAN:

Setelah penyajian materi ini, peserta diharapkan dapat memahami kegunaan SEPAKAT dalam melakukan analisis untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran bagi program pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).



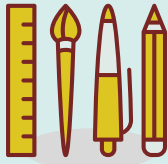
WAKTU:

6 X 45 Menit



METODE:

- Ceramah
- Praktek
- Curah Pendapat



MEDIA:

- LCD Projector
- Laptop/Komputer



SUMBER REFERENSI:

- User Manual SEPAKAT
- Bahan Paparan Panduan Pengguna SEPAKAT
- Lembar Kerja Pelatihan



HANDOUT:

- Presentasi PowerPoint
- Lembar Kerja Pelatihan

4.1 MODUL PERENCANAAN

4.1.1. LATAR BELAKANG

Perlambatan penurunan kemiskinan dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa diperlukan upaya yang lebih fokus, inovatif dan mampu menjawab keragaman persoalan kemiskinan di daerah. Pendekatan perencanaan dan penganggaran daerah yang *business as usual* dinilai tidak akan mampu lagi menjawab berbagai tantangan di masa depan. Inovasi, akselerasi dan kolaborasi merupakan kata kunci kesuksesan penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan danantisipasi kerentanan. Pertanyaannya adalah perencanaan seperti apa yang perlu diperlukan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ?

Menjawab hal ini, diperlukan perbaikan model perencanaan di daerah agar pemerintah daerah dapat menyusun opsi intervensi berbasiskan data, fakta dan analisa yang telah dihasilkan berbasiskan bukti (*evidence based approach*). Rancangan opsi intervensi dapat didasarkan pada analisis pohon masalah yang dapat dikembangkan oleh masing-masing daerah. Melalui model perencanaan ini, pemerintah daerah akan dibantu untuk penyusunan program dan kegiatan, utamanya dalam bidang penanggulangan kemiskinan, menjadi lebih terarah, terfokus dan menjawab persoalan kemiskinan secara spesifik.

Lokasi, sasaran dan target kinerja merupakan informasi-informasi kunci dalam perumusan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dan terfokus. Dalam hal sasaran program dan kegiatan, data pendukung perencanaan pada tingkat kabupaten, kecamatan atau hingga desa dijadikan prasyarat agar rancangan program dan kegiatan yang dihasilkan dari proses perencanaan lebih fokus dan terarah kepada wilayah kantong kemiskinan. Fokus dan terarah kepada kantong kemiskinan juga perlu dipastikan dengan menetapkan sasaran penerima program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah mereka yang masuk dalam daftar keluarga atau penduduk di Basis Data Terpadu (BDT). Penargetan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan sudah seharusnya mengacu pada data kemiskinan nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial melalui Basis Data Terpadu (BDT) atau saat ini disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) fokus dan terarah kepada wilayah kantong kemiskinan.

Sebagai ilustrasi, Basis Data Terpadu (BDT) sudah diluncurkan pada tahun 2015, namun hingga tahun 2019 masih ada pemerintah daerah yang dokumen perencanaannya belum merujuk pada data BDT tersebut. Padahal secara eksplisit masih menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan masih mejadi salah satu prioritas pembangunannya. Sebut saja misalnya informasi tentang anak pada usia sekolah yang tidak bersekolah, pada renja SKPD Dinas Pendidikan tidak muncul kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan anak usia sekolah yang tidak bersekolah ke bangku sekolah.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian pemerintah daerah, belum bisa mengaitkan (dalam hubungan sebab akibat) antara informasi yang tersedia dengan kegiatan intervensi program. Keberadaan sistem perencanaan yang memandu pemerintah daerah menyusun program dan kegiatan yang terkait dengan data dan informasi yang tersedia akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan pemerintah daerah.

Selain permasalahan kualitas dokumen perencanaan yang tidak merujuk pada data yang tersedia, permasalahan lainnya adalah inkonsistensi dokumen perencanaan dengan penganggaran. Artinya dokumen perencanaan yang sudah bagus tidak dengan sendirinya melahirkan penganggaran yang bagus. Sebagai contoh, pada perencanaan sudah disebutkan secara eksplisit daerah yang akan diintervensi sesuai dengan prioritas permasalahan di suatu daerah. Pada saat penyusunan anggaran, daerah-daerah

Proses Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Masyarakat Miskin

yang menjadi lokasi intervensi kegiatan bisa tidak muncul, diganti dengan nama Kabupaten/Kota atau nama OPD-nya, akibatnya daerah yang akan mendapat intervensi kegiatan menjadi tidak spesifik.

Berikut ini contoh format perencanaan yang sudah menyebutkan lokasi kegiatan yang akan mendapat intervensi. Dari 11 kecamatan, hanya 5 kecamatan yang akan mendapatkan intervensi kegiatan.

Rencana Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maja Tahun 2017									
Kabupaten X									
SKPD : DINAS KESEHATAN									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2016			Catatan (Penting)	Prakiraan Maja Tahun 2017	
				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan			target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif dan
				APBD Kab	APBD Prov	APBN			
NON LIRISAN									
Program dan kegiatan pada SKPD									
0	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			2.836.436.000	-	-	-	1.500.000.000
0	2	3	Pembangunan Gedung Kantor	Tertibkannya kelengkapan pembang	W/5 Dirkes	1 paket	1.200.000.000		
0	2	6	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Meningkatnya alokasi dan kualitas pe	Dirkes, Gudang Jemas, Lab. Kas	1 paket	85.000.000		30.000.000
0	2	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Terperuhnya mobil Pusing Puskesmas, Kendaraan Operasional Roda 2 tenaga santas untuk melaksanakan obyek keidngi rebanasi	Puskesmas Dukuhut, Puskesmas	1 Paket Mobil Pusing, 3	525.000.000		250.000.000
Kegiatan keidng (pengawasan, pemantauan dan pengamatan)									
0	2	10	Pengadaan Meubeler	Terperuhnya sarana prasarana pus	11 Puskesmas POND ABCDEF GHIJ	1 paket	250.000.000		250.000.000
0	2	11	Pengadaan komputer dan Printer	Tertibkannya pengadaan kompu	5 Puskesmas Puskesmas A, B, C, D, E	1 paket	250.000.000		350.000.000
0	2	24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Meningkatnya alokasi dan kualitas pe	Kendaraan operasional/Dirkes, G	42 paket	535.436.000	APBD	500.000.000
0	2	28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Meningkatnya alokasi dan kualitas pe	Dirkes, Gudang Jemas, Lab. Kas	1 tahun	55.000.000		60.000.000

Pada saat dilihat pada format penganggaran (DPA 2.2.1), lokasi intervensi yang diperencanaan disebutkan lokasi kegiatan berada di kecamatan, nama kecamatannya sudah berganti dengan nama Kabupaten/ Kota atau nama OPD.

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN			No. DPA SKPD 1.02.01.02.11.5.2	DPA SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN X				
Tahun Anggaran 2016				
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN				
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN				
Program : 1.02.01.01. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR				
Kegiatan : 1.02.01.02.11. Pengadaan Komputer dan Printer				
Lokasi Kegiatan : Kab. X				
Waktu Pelaksanaan : Agustus-September				
Jumlah Anggaran : Rp. 250.000.000,- (Dua rarus lima puluh juta rupiah)				
Sumber Dana : APBD Kab				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung				
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Prog	Cakupan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan		100%	
Masukan	Dana yang dibutuhkan		250,000,000.00	
Keluaran	Komputer		5 buah	
	Printer		5 buah	
Hasil	Dimanfaatkannya setiap peralatan kantor untuk menunjang pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung		100%	

Sebagian orang memandang hilangnya lokasi ini tidak bermasalah, karena yang dianggap paling penting adalah besarnya anggaran yang dialokasikan pada kegiatan tersebut. Besarnya anggaran memang perlu, tetapi ketika sasarannya berubah, maka dampak kegiatan tersebut tidak akan sesuai dengan perencanaan.

Ketika yang disebutkan dalam lokasi kegiatan adalah nama Kabupaten/kota atau OPD, maka dimana saja kegiatan itu diselenggarakan akan dibenarkan secara administrative, namun tidak benar sesuai dengan tujuan perencanaan. Jika pola ini dibiarkan, maka daerah (kecamatan) yang memiliki kedekatan tertentu pada oknum penyusunan anggaran akan mendapatkan intervensi lebih banyak.

Keberadaan alat bantu yang 'memaksa' pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pada permasalahan yang dihadapi dan mengalokasikan anggaran di daerah-daerah yang memerlukan akan memudahkan pemerintah dalam proses penganggaran.

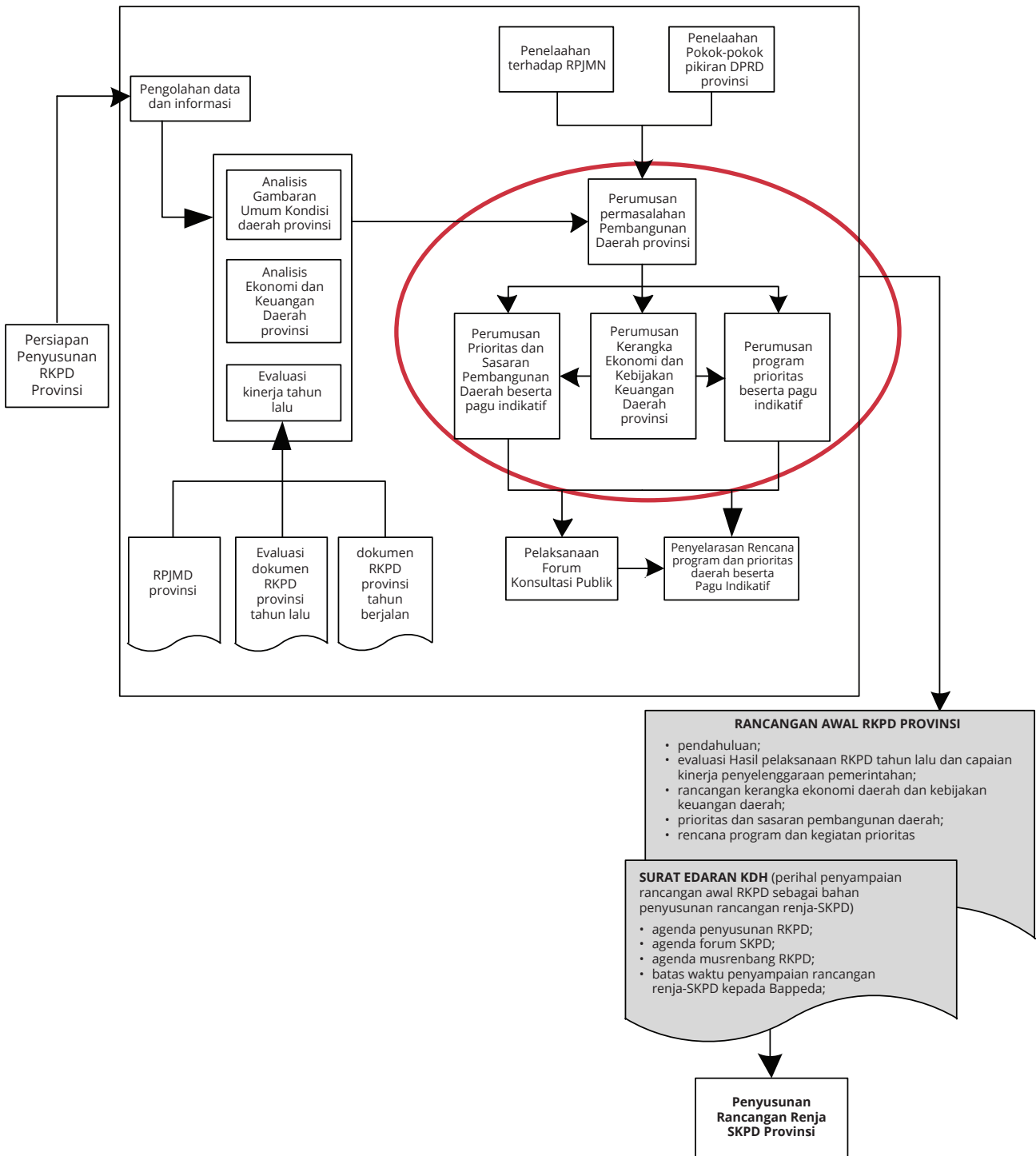
4.1.2. KONSEP DAN DEFINISI

Berdasarkan konsep dan definisi yang dikembangkan oleh Bappenas (2008), Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin/*Pro-poor Planning and Budgeting* (P3B) adalah proses perencanaan dan penganggaran yang menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Rencana dan anggaran dikatakan berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*) apabila:

- Rencana dan anggaran bertujuan untuk mengatasi penyebab-penyebab kemiskinan dan membantu masyarakat miskin mengakses dan memanfaatkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan.
- Masyarakat miskin memperoleh perhatian khusus/lebih, misalnya, prioritas kegiatan lebih banyak dan anggaran yang lebih besar daripada kelompok masyarakat lainnya.
- Rencana dan anggaran berbagai sektor diarahkan pada wilayah wilayah dengan jumlah penduduk miskin cukup besar atau memiliki masalah kemiskinan, baik bersifat langsung seperti misalnya penanganan kasus gizi buruk, maupun tidak langsung misalnya melalui pembangunan prasarana air minum, pasar atau pabrik untuk penjual atau pekerja informal.
- Rencana pembangunan yang disusun ditujukan untuk memberi manfaat maksimal bagi rakyat miskin terkait pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Millenium.
- Masyarakat miskin secara aktif berperan serta dalam seluruh proses pembangunan dimulai dari identifikasi, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program/kegiatan pengurangan kemiskinan.

4.1.3. MEKANISME DAN ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

Merujuk pada permendagri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada saat penyusunan Rancangan Awal salah satu langkah yang dilakukan adalah perumusan permasalahan pembangunan daerah, sebelum memasuki langkah ini sudah diawali dengan pengolahan data dan informasi. Pada tahap ini juga akan muncul penyusunan prioritas program dan sasaran-sasaran pembangunan. Bagan berikut memperlihatkan lebih rinci tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD.

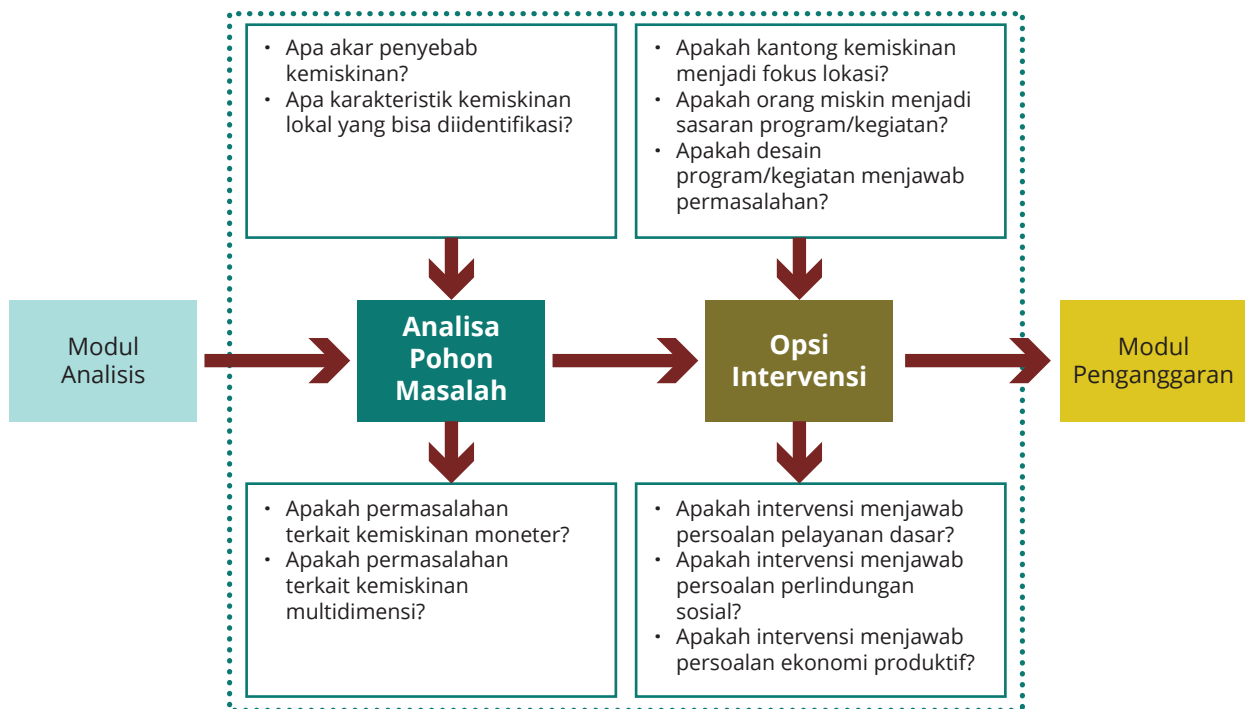


4.1.4. ANALISIS PERENCANAAN MENGGUNAKAN SEPAKAT

Sesuai dengan alur perencanaan pada table di atas, maka alur perencanaan dalam sistem SEPAKAT akan diawali dengan analisis kemiskinan untuk memastikan pada sektor apa yang memiliki permasalahan, bagaimana kesenjangan pencapaiannya, serta dimana permasalahan itu terjadi. Hasil analisis ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan prioritas dengan isu utama yang diangkat adalah Masyarakat Miskin, indikator SPM dan SDGs, serta selisih capaian absolut dari target. Hasil dari prioritas ini adalah usulan alternatif intervensi yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan.

Langkah selanjutnya setelah munculnya alternative intervensi berdasar prioritas yang telah ada, pemerintah daerah dapat melakukan analisis secara mandiri dengan menggunakan **Analisis Pohon Masalah** yang sudah tersedia dalam sistem, dan serangkaian kegiatan sampai dengan penganggarannya.

Berikut ini adalah metode dan pendekatan perencanaan dalam SEPAKAT.



1. Analisa Pohon Masalah/Problem Tree Analysis

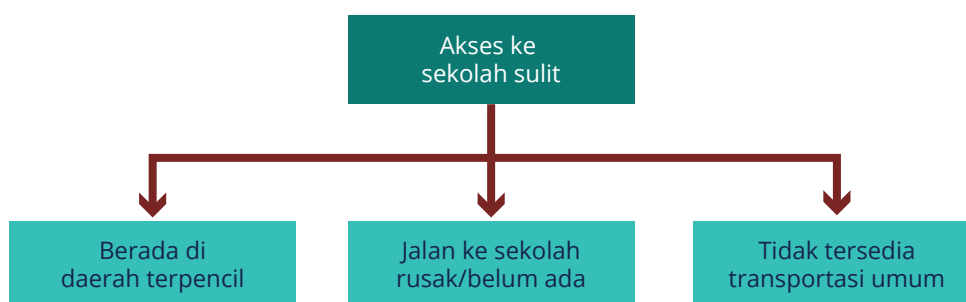
Problem Tree Analysis atau sering disebut pohon masalah merupakan metode yang digunakan untuk memetakan anatomi sebab dan akibat untuk mencari penyebab suatu masalah. Dalam SEPAKAT, analisis pohon masalah ini digunakan untuk membantu dalam membentuk pola pikir yang lebih terstruktur dan berdasarkan fakta (data) untuk mencari penyebab dari suatu masalah kemiskinan yang sudah teridentifikasi dan menjadi prioritas.

Untuk melakukan analisa secara mendetail dapat dilakukan melalui serangkaian pertanyaan bertahap yang dapat menjawab penyebab dari suatu masalah. Dalamnya analisis dapat ditentukan dari tahapan pertanyaan. Gambar di bawah merupakan contoh analisa menggunakan metode *problem tree analysis*.



Jika ingin menggali akar penyebab permasalahan maka pertanyaan dapat terus dilanjutkan sehingga, seperti contoh berikut:

GRAFIK 8. ANALISIS MENGGUNAKAN POHON MASALAH



Dengan menemukan akar permasalahan maka dapat dirumuskan intervensi program/ kegiatan yang tepat dan sesuai dengan kondisi di daerah.

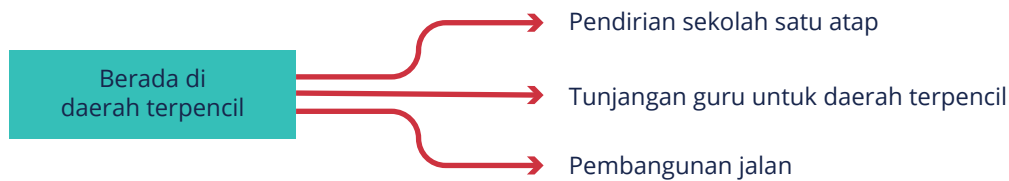
Pada SEPAKAT, pemilihan suatu indikator kemiskinan yang akan dianalisis dapat bersumber dari:

- a. Hasil analisis profil kemiskinan dan prioritasasi yang mengacu kepada data Susenas dan Sakernas
- b. Hasil monev pencapaian pembangunan daerah yang mengacu kepada data daerah/ sektor

2. Perumusan Program/Intervensi

Berdasarkan analisis menggunakan pohon masalah (problem tree analysis) ditemukan serangkaian penyebab dari suatu masalah, yang kemudian dapat dirumuskan intervensi terbaik sesuai dengan permasalahan dan kondisi yang ada di daerah. Proses ini sebaiknya dilakukan berdasarkan penilaian yang obyektif dan melalui suatu proses diskusi (FGD) dengan para pihak yang terkait sehingga dapat dirumuskan suatu indikasi intervensi yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam SEPAKAT, pilihan indikasi intervensi/ program disediakan secara otomatis yang disertai dengan data dukung terkait target lokasi dan target sasaran yang bersumber dari data BDT. Berikut contoh keterhubungan penyebab masalah dengan pemilihan indikasi intervensi.

GRAFIK 9. **PENENTUAN INDIKASI INTERVENSI PROGRAM**



4.1.5. PRASYARAT PENGGUNAAN APLIKASI PERENCANAAN DALAM SEPAKAT

4.1.5.1. KEBUTUHAN DAN KELENGKAPAN SISTEM

Untuk dapat menggunakan aplikasi SEPAKAT dengan baik, ada beberapa kebutuhan dan kelengkapan yang harus disiapkan meliputi:

1. Jaringan internet. Sebagai sebuah aplikasi berbasis web, pengguna SEPAKAT harus memastikan bahwa tersedia jaringan internet yang cukup stabil sehingga memungkinkan akses web SEPAKAT dengan baik.
2. Perangkat laptop atau komputer. Perangkat laptop atau komputer disarankan memiliki software chrome sehingga aplikasi SEPAKAT akan dapat diakses dengan baik
3. *Username* dan *password*. Sebagai sebuah aplikasi yang didedikasikan untuk pemerintah daerah, Bappenas telah mensyaratkan username dan password untuk akses ke dalam SEPAKAT bagi masing-masing pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

4.1.5.2. MENYIAPKAN DAN INPUT DATA DAERAH DALAM DATABASE SEPAKAT

Sebenarnya pada level analisis, SEPAKAT sudah menyediakan data yang bersumber dari hasil Susenas, Sakernas, Podes, dan BDT/DTKS, hanya saja data ini lebih digunakan untuk analisis, bukan untuk intervensi program/kegiatan. Sementara setiap daerah pasti memiliki data lain yang terkait dengan kinerja pembangunan daerah masing-masing, ataupun data yang terkait dengan intervensi kegiatan seperti misalnya jumlah ruang kelas, jumlah puskesmas, jumlah posyandu, panjang jalan yang rusak berat, banyaknya penduduk yang tidak memiliki jamban dan lain-lain.

Ketersediaan data daerah ini dalam perhitungan perencanaan akan berguna untuk menjadi data pendukung pada modul perencanaan di luar data pendukung yang telah tersedia dalam aplikasi SEPAKAT. Dalam hal ini, Bappenas telah merancang modul data SEPAKAT daerah sehingga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dapat memiliki data daerah yang terintegrasi dalam sistem SEPAKAT. Sebagai informasi, Sistem SEPAKAT memungkinkan untuk mengakomodir data dukung perencanaan hingga tingkat desa, artinya jika data dukung perencanaan ini tersedia hingga tingkat desa maka hasil program dan kegiatan yang dihasilkan akan secara detil memuat lokasi hingga tingkat desa.

Prosedur dan teknis lebih lanjut terkait input data daerah dalam sistem SEPAKAT ini akan disampaikan dalam bagian modul data SEPAKAT daerah.

4.2 MODUL PENGANGGARAN

4.2.1. LATAR BELAKANG

Permendagri 86 tahun 2017 pasal 149 (5) menyebutkan bahwa RKPD ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD, hal yang sama dinyatakan pula dalam Permendagri 54 tahun 2010 pasal 129 (3) dengan redaksi yang sedikit berbeda bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara teoritis perencanaan harus menjadi landasan dalam penganggaran. Sehingga perencanaan dan penganggaran akan selalu konsisten dan relevan. Pada tataran implementasi perencanaan tidak selalau konsisten dan relevan dengan penganggaran.

TABEL 1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DI KABUPATEN X

Kode	Urusan/Budang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Sasaran Kegiatan	Rencana Tahun 2016			Prakiraan Maju Tahun 2017
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					
02	3 Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya kelanjutan pembangunan	Dinkes	1 paket	1,200,000,000	
02	8 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya akses dan kulaitas pelayanan	Gedung farmasi dan Lab	1 paket	85,000,000	90,000,000
02	5 Pengadaan kendaraan dinas operasional	Terpenuhinya mobil pusling puskesmas, kendaraan operasional roda dua tenaga sanitasi (Kesling)	Puskesmas A, B, dan C	1 mobil 3 sepeda motor	525,000,000	250,000,000
02	10 Pengadaan meubelair	Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas	11 Puskesmas (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K)	1 palet	250,000,000	250,000,000
02	11 Pengadaan Komputer dan printer	Terlaksananya pengadaan komputer dan printer	5 Puskesmas (A, B, C, D, dan E)	1 paket	250,000,000	350,000,000
02	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Meningkatnya akses dan kulaitas pelayanan	Kendaraan operasional Dinkes	42 paket	531,496,000	500,000,000

Pada tabel di atas (lihat kode 02.11), kegiatan pengadaan komputer dan *printer* lokasinya berada di 5 Puskesmas, yaitu Puskesmas A, Puskesmas B, Puskesmas C, Puskesmas D, dan Puskesmas E. Penyebutan lokasi ini menjadi penting karena berdasar data dari Dinas Kesehatan, memang dalam hal ini 5 Puskesmas tersebut memang belum memiliki komputer dan printer.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, lokasi untuk kegiatan pengadaan komputer dan *printer* dalam dokumen penganggaran harus tetap tercantum sebagai wujud implementasi penganggaran yang merujuk pada dokumen perencanaan (Renja SKPD). Salah satu dokumen penganggaran yang paling rinci adalah form dokumen DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) 2.2.1.

TABEL 2. **FORMAT DPA KEGIATAN PENGADAAN KOMPUTER DAN PRINTER DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 DI KABUPATEN X**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		No. DPA SKPD 1.02.01.02.11.5.2	DPA SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
KABUPATEN X			
Tahun Anggaran 2016			
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN			
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN			
Program : 1.02.01.01. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR			
Kegiatan : 1.02.01.02.11. Pengadaan Komputer dan Printer			
Lokasi Kegiatan : Kab. X			
Waktu Pelaksanaan : Agustus-September			
Jumlah Anggaran : Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)			
Sumber Dana : APBD Kab			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Prog	Cakupan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	100%	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	250,000,000.00	
Keluaran	Komputer	5 buah	
	Printer	5 buah	
Hasil	Dimanfaatkannya setiap peralatan kantor untuk menunjang pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung	100%	

Pada Tabel 2 diatas, penulisan lokasi untuk 5 Puskesmas sudah tidak tercantum, karena diubah menjadi nama kabupaten. Kalau dilihat dari jumlah anggaran yang dikeluarkan, serta banyaknya komputer dan *printer* yang dibeli, jumlahnya tetap sama. Namun, implementasi dari dua pernyataan ini bisa sangat berbeda. Sebab, apabila nama kabupaten tercantum sebagai nama lokasi, maka dimanapun barang yang dibeli itu diletakkan, akan dibenarkan secara administratif, asalkan jumlahnya benar. Akan tetapi, informasi ini menjadi tidak benar, apabila dilihat dari tujuan perencanaan.

Kalau pada DPA 2.2.1 lokasi yang disebut tetap berada di 5 kecamatan, maka komputer dan *printer* yang dibeli harus diletakkan sesuai dengan yang tercantum dalam DPA 2.2.1 tersebut. Artinya, Dinas Kesehatan akan disalahkan secara administratif, jika tidak mengalokasikanya pada lokasi yang telah direncanakan tersebut.

Kebiasaan mengubah nama lokasi yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dapat menimbulkan masalah. Misalnya, lokasi yang telah disebut spesifik dalam dokumen perencanaan, tetapi lalu diubah dengan nama lokasi yang lebih umum (tidak spesifik lagi) dalam dokumen penganggaran. Dengan kondisi seperti ini, selain akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan, juga akan memperbesar peluang terjadinya pelanggaran oleh oknum tertentu, karena membagikan lokasi pada daerah-daerah yang melakukan pendekatan secara personal kepada oknum tersebut.

Inkonsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran bukan hanya terjadi pada perubahan nama lokasi yang sudah spesifik menjadi lebih umum, namun juga konsistensi pada substansi pencapaian tujuan perencanaan. Target capaian indikator pembangunan yang mengarah pada capaian pembangunan yang lebih baik, perlu diselaraskan dengan jumlah anggarannya. Apabila terjadi penurunan jumlah anggaran, maka tidak dapat kita pungkiri bahwa capaian pembangunan dapat terhambat.

TABEL 3. CONTOH TABEL TARGET INDIKATOR RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN TAHUN 2011-2015 DI KABUPATEN X

Tujuan/Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Satuan Indikator Sasaran Pokok	Kondisi Awal Indikator Sasaran Pokok		Target Indikator Sasaran Pokok				
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.2.1 Sasaran Pokok: Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Jumlah bayi (0-1th) meninggal	orang	171	150	135	120	100	85	65
	Jumlah ibu meninggal pada masa kehamilan, melahirkan dan masa nifas	orang	62	60	58	56	54	52	50

Pada tahun 2011 diharapkan terjadi penurunan jumlah bayi meninggal, dari 150 menjadi 135 bayi, Begitu juga jumlah ibu meninggal pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas yang ingin diturunkan dari 60 menjadi 58 orang. Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan anggaran yang terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan tersebut.

TABEL 4. ANGGARAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2010 DAN 2011 DI KABUPATEN X

Program Dinas Kesehatan	Tahun	
	2010	2011
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	33.710.000	96.630.000
Program obat dan perbekalan kesehatan	5.500.900.000	3.896.408.000
Program pelayanan administrasi perkantoran	1.754.445.000	1.889.774.800
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	43.205.000	23.060.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.671.305.000	1.167.450.550
Program pendidikan lanjutan kesehatan	903.580.000	655.500.000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	2.252.902.500	1.642.756.000
Program pengembangan lingkungan sehat	400.248.000	200.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur	46.000.000	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	509.962.500	90.150.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	150.570.000	120.804.000
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	13.190.000	39.175.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	288.676.000	93.800.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.020.761.000	549.000.000
Program perbaikan gizi masyarakat	2.846.463.000	2.617.602.500
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	365.955.000	324.078.050
Program standarisasi pelayanan kesehatan	100.000.000	117.956.900
Program upaya kesehatan masyarakat	7.802.196.050	5.502.150.150

Program yang terkait dengan penurunan angka kematian bayi adalah program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita. Program ini mendapatkan anggaran sebesar Rp 150.570.000,- pada tahun 2010 dan mendapat anggaran sebesar Rp 120.804.000,- pada tahun 2011. Target penurunan angka kematian bayi yang ingin dicapai pada tahun 2011 lebih tinggi daripada target pada tahun 2010, namun anggaran yang dialokasikan lebih sedikit.

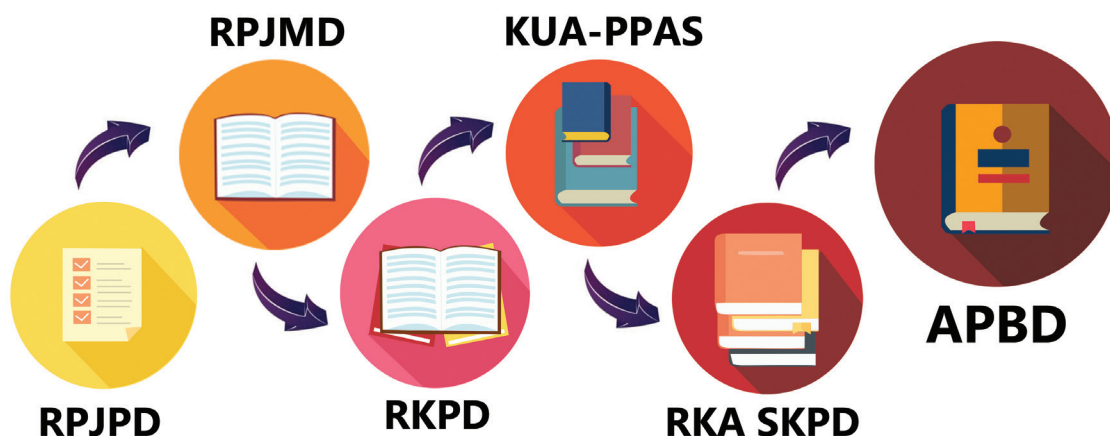
Dua contoh diatas hanya sebagian kecil dari contoh kurang selarasnya perencanaan dan penganggaran yang terjadi di daerah. Pemanfaatan alat bantu dapat membantu pemerintah daerah dalam meminimalisasi terjadinya peristiwa diatas atau kejadian lainnya yang sejenis. Alat bantu ini sudah disediakan oleh Bappenas dalam bentuk aplikasi berbasis web, yang dikenal sebagai SEPAKAT (Sistem Perencanaan Penganggaran Monitoring Evaluasi dan Analisis Kemiskinan Terpadu).

4.2.2. PENGANGGARAN YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT MISKIN

Anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin didefinisikan sebagai anggaran berbasis kinerja yang secara jelas dan transparan memberi perhatian lebih pada target lokasi dan penerima manfaat yang miskin. Dengan mengetahui besarnya proporsi alokasi anggaran jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan masyarakat luas, harapannya hal ini dapat mengatasi akar masalah kemiskinan, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Terlepas dari nama program atau kegiatan pada penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, hal terpenting yang perlu kita perhatikan yaitu penerima manfaatnya tergolong orang miskin atau rentan miskin. Sebab, program atau kegiatan tersebut ditujukan untuk penurunan angka kemiskinan.

Perpindahan fase dokumen perencanaan ke penganggaran dimulai dari lahirnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara), sebagaimana terlihat dalam alur berikut:



Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747> diakses pada 20 Desember 2019

Dengan memperhatikan alur diatas, hasil Modul Analisis dan Penganggaran SEPAKAT dapat muncul pada dokumen (RPJPD-RPJMD-RKPD), yang selanjutnya akan masuk pada penyusunan KUA-PPAS.

4.2.2.1. SKUA-PPAS

Pada dasarnya, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sebagai dokumen perencanaan. Sehingga permasalahan strategis dan prioritas yang dirumuskan dalam perencanaan, seharusnya menjadi prioritas pula pada saat penyusunan KUA-PPAS. Pada dokumen KUA-PPAS ini pernyataan pemihakan pada orang miskin sudah harus ada, dimana informasi tersebut juga akan muncul pada dokumen penganggaran turunannya. Setelah KUA-PPAS ini selesai disusun, Kepala Daerah akan membuat surat edaran tentang panduan penyusunan RKA kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Sesuai dengan namanya, dokumen KUA-PPAS mencakup informasi program yang diprioritaskan, pagu anggaran, serta besarnya anggaran yang akan diimplementasikan di setiap daerah (kecamatan). Langkah penting berikutnya adalah memastikan apa yang telah tercantum dalam dokumen KUA-PPAS diterjemahkan seluruhnya dalam dokumen RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) untuk setiap kegiatan di daerah.

4.2.2.2. RKA (RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN)

Pada dokumen perencanaan (RKPD) kita memperoleh informasi terkait daerah-daerah yang bermasalah yang diprioritaskan berdasarkan permasalahannya, begitu juga dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS). Selanjutnya pada dokumen RKA tercantum program, kegiatan, lokasi, target dan besar anggarannya. Dokumen RKA ini terbagi dalam dua bentuk yaitu: Format RKA2.1 dan Format RKA 2.2. Format RKA 2.1 digunakan untuk Belanja Tidak Langsung, dan Format RKA 2.2 digunakan untuk Belanja Langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari beberapa jenis yaitu: Pelanja Pegawai, Bunga Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Peluang kegiatan penanggulangan kemiskinan yang masuk dalam kategori belanja Tidak Langsung adalah Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

TABEL 5. **FORMAT RKA 2.1**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN		No. DPA SKPD 1.02.01.02.11.5.2	DPA SKPD 2.2.1
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
KABUPATEN X			
Tahun Anggaran 2016			
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN			
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN			
Program : 1.02.01.01. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR			
Kegiatan : 1.02.01.02.11. Pengadaan Komputer dan Printer			
Lokasi Kegiatan : Kab. X			
Waktu Pelaksanaan : Agustus-September			
Jumlah Anggaran : Rp. 250.000.000,- (Dua rarus lima puluh juta rupiah)			
Sumber Dana : APBD Kab			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung			
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	
Capaian Prog	Cakupan pemenuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sesuai kebutuhan	100%	
Masukan	Dana yang dibutuhkan	250,000,000.00	
Keluaran	Komputer	5 buah	
	Printer	5 buah	
Hasil	Dimanfaatkannya setiap peralatan kantor untuk menunjang pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung	100%	

Format RKA.2.2 memuat rangkuman anggaran Belanja Langsung. Semua anggaran terkait atau tidak terkait penanggulangan kemiskinan, disajikan dalam format ini. Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Nama program dan kegiatannya juga sudah tersedia. Hanya saja komposisi perolehan anggaran di setiap daerah biasanya belum bisa dibaca (tidak tertulis eksplisit nominal anggaran per-kecamatan). Anggaran Belanja Langsung yang lebih rinci didapat di format RKA 2.2.1.

TABEL 6. **FORMAT RKA 2.2**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir RKA - SKPD 2.2	
Provinsi/Kabupaten/Kota									
Tahun Anggaran									
Urusan Pemerintahan : X. XX.				M					
Organisasi : X. XX. XX				M					
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah				
Program Kegiatan					Tahun n			Tahun n+1	
1	2				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	9=6+7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
XX		Program ...							
	XX	Kegiatan ...	Ker	M		M	M		
	XX	Kegiatan ...							
	XX	dst ...							
XX		Program ...							

Untuk saat ini SEPAKAT hanya dapat menyajikan *format level 2.1* dan *format level 2.2*, belum bisa hingga *format level 2.2.1*.

4.2.3. PRASYARAT PENGGUNAAN APLIKASI PENGANGGARAN DALAM SEPAKAT

4.2.3.1. KEBUTUHAN DAN KELENGKAPAN SISTEM (KOMPUTER, INTERNET, DAN KEBUTUHAN TEKNIS LAINNYA)

Sebagai sebuah aplikasi berbasis web, pengguna SEPAKAT harus memastikan bahwa jaringan internet sudah tersedia dan memiliki *web browser*, seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru, untuk dapat mengakses web SEPAKAT.

4.2.3.2. MENYIAPKAN DAN INPUT DATA DAERAH DALAM DATABASE SEPAKAT

Pada level analisis, SEPAKAT sudah menyediakan data dari Susenas, Sakernas, Podes, dan BDT (saat ini disebut sebagai DTKS). Hanya saja data ini digunakan untuk analisis, bukan untuk intervensi program/kegiatan. Sementara setiap daerah pasti memiliki data lain yang terkait dengan kinerja pembangunan daerah masing-masing. Selain tentu saja data yang terkait dengan intervensi kegiatan seperti jumlah ruang kelas, panjang jalan yang rusak berat, banyaknya penduduk yang tidak memiliki jamban dan lain-lain.

Dalam perhitungan anggaran, ketersediaan data ini digunakan sebagai volume (kuantitas) yang akan dijadikan faktor pengali dari satuan harga yang diketahui. Selain itu, data juga bisa menjadi acuan dari target yang ingin dicapai.

4.2.3.3. MENYIAPKAN DAN INPUT SATUAN HARGA UNTUK SETIAP INTERVENSI KEGIATAN

Ketersediaan harga satuan diperlukan untuk menghitung keseluruhan anggaran terkait terhadap rencana pencapaian target yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Dengan mengisi satuan harga ke dalam sistem, maka sistem secara otomatis akan menghitung anggaran yang diperlukan dalam satu kegiatan.

Sistem secara otomatis menghitung selisih perubahan yang terjadi, apabila pagu yang ditetapkan dalam satu kegiatan, berasal dari harga satuan yang dimasukkan ke dalam sistem.

BAB 5

Proses Monitoring & Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan



PETUNJUK PEMBELAJARAN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH



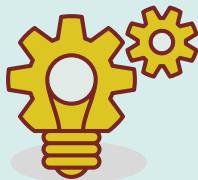
TUJUAN:

Setelah penyajian materi ini, peserta diharapkan dapat memahami pendekatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah



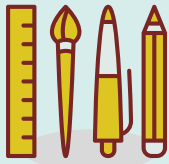
WAKTU:

4 X 45 Menit



METODE:

- Ceramah
- Curah Pendapat



MEDIA:

- LCD Projector
- Laptop/Komputer



SUMBER REFERENSI:

- Bahan Paparan Monitoring Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- Bahan Paparan Pengantar SEPAKAT
- Lembar Kerja Pelatihan



HANDOUT:

- Presentasi PowerPoint
- Handout
- Lembar Kerja Pelatihan

5.1 LANDASAN HUKUM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program pembangunan dilandasi oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 14 dan 19 yang menjelaskan tentang reformasi pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pembangunan yang berbasis informasi kinerja atau *Performance Based Budgeting*. Dalam rangka penyusunan APPB, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Demikian halnya dengan penyusunan APBD, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang dicapai.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur sistem penganggaran Negara. Sesuai peraturan perundang-undangan tersebut, menteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya dengan menguraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi program, dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang telah mengamanatkan bahwa pimpinan Kementerian/Lembaga/Kepala SKPD harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, menjelaskan tentang lingkup pengukuran kinerja pelaksanaan rencana pembangunan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dilakukan oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala SKPD Provinsi, Kepala SKPD Kab/Kota. Kegiatan ini dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output) dan kendala yang dihadapi. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja K/L dan RKP, RPJMN dan Renstra K/L berdasarkan sumber daya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan, dan atau indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.

5.1.1. TUJUAN DAN MANFAAT MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN

Monitoring dan evaluasi adalah rangkaian aktivitas yang sangat penting dalam sebuah siklus manajemen pengelolaan program. Monitoring merupakan wahana untuk melakukan identifikasi dini, apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, baik dalam konteks waktu pelaksanaan, capaian target output maupun serapan anggaran yang direncanakan. Sedangkan evaluasi biasanya dilakukan untuk melakukan analisis apakah target keseluruhan dari program yang dilaksanakan sesuai dengan target capaian.

Secara teoritik, **Monitoring** didefinisikan sebagai aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar deviasi awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan atauantisipasi, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Sedangkan **Evaluasi** merujuk kepada kegiatan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Evaluasi bertujuan menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: melalui evaluasi dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. Mengukur tingkat keluaran: mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan. Mengukur dampak suatu kebijakan: evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan: untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. Sebagai masukan (input) suatu kebijakan yang akan datang: untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Dengan kerangka pikir tersebut diatas, monitoring dan evaluasi membutuhkan informasi yang memadai mengenai kerangka logis dari sebuah perencanaan pelaksanaan program. Tanpa kerangka logis yang baik atas perencanaan sebuah program, monitoring dan evaluasi tidak akan maksimal hasilnya.

5.1.2. KOMPONEN KUNCI MONITORING DAN EVALUASI YANG BAIK

Untuk menghasilkan manfaat yang maksimal, suatu proses monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan harus memiliki kriteria komponen kunci sebagai berikut:

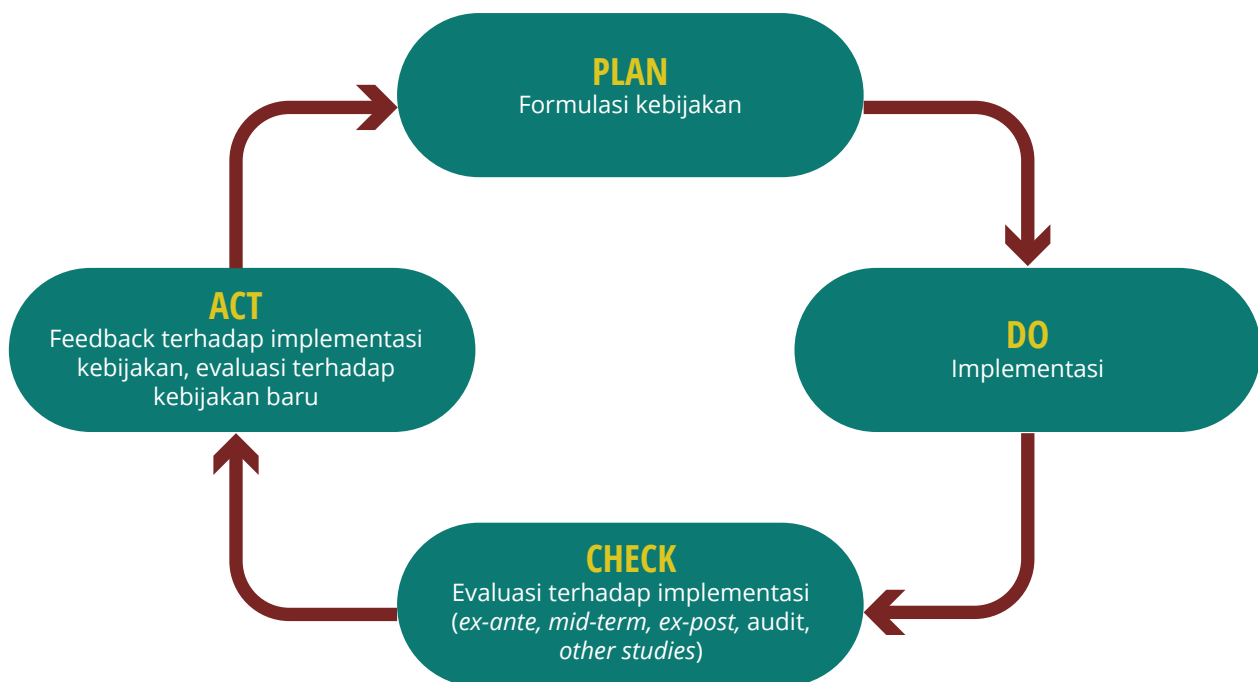
1. **Tujuan yang jelas.** Tujuan monitoring dan evaluasi ditentukan lebih awal, sederhana dan mudah diukur.
2. **Metodologi yang tepat.** Penggunaan metodologi disesuaikan dengan maksud dan tujuan monitoring dan evaluasi.
3. **Kehandalan (Reliable).** Kehandalan dari suatu proses evaluasi dinilai dari perolehan hasil yang setara untuk berbagai kondisi yang dapat diperbandingkan. Hal ini terutama untuk menghindari faktor-faktor penilaian subyektifitas dalam melakukan pengukuran pencapaian hasil program pembangunan.

4. **Transparan.** Transparansi bergantung pada sejauhmana pihak yang terlibat memahami dengan baik proses pelaksanaannya. Ini termasuk pemahaman mengenai tujuan, alasan maupun hasil yang diharapkan.
5. **Dapat dipercaya (Credible).** Tingkat kredibilitas suatu proses monitoring dan evaluasi sangat bergantung pada tingkat validitas hasil proses monitoring evaluasi tersebut. Oleh karena itu, kecermatan dalam mengukur capaian sesuai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, mengukur kewajaran dalam dalam pendanaan untuk pembiayaan implementasi kegiatan pembangunan, serta keterbukaan ketika proses monitoring evaluasi merupakan faktor penting dan perlu diperhatikan.
6. **Tingkat komprehensifitas (Comprehensiveness).** Hal ini sangat bergantung pada kesesuaian proses yang diamati dengan kesesuaian target sasaran pembangunan yang dimonitoring pencapaian hasilnya.
7. **Efektifitas (Effectiveness).** Hal ini bergantung pada sejauhmana dampak dari proses pembangunan menyebabkan perubahan dan perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*), termasuk identifikasi peluang perubahan dan ketersediaan informasi.

5.1.3. PENGERTIAN MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan satu mata rantai dari siklus perencanaan yang melibatkan empat tahapan pokok, yang secara ringkas ditunjukkan pada gambar dibawah ini:

1. Formulasi kebijakan, program dan kegiatan (*Plan*)
2. Implementasi (*Do*)
3. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi (*Check*)
4. Umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan baru (*Act*)



Tabel berikut ini menyandingkan pengertian tentang perbedaan antara monitoring dan evaluasi.

TABEL 7. PERBEDAAN MONITORING DAN EVALUASI

Aspek	Monitoring	Evaluasi
Tujuan	Menilai kemajuan pelaksanaan program terhadap sasaran yang ingin dicapai	Menganalisis mengapa sasaran dapat tercapai atau tidak
Pertanyaan	Sampai dimanakah tingkat yang ingin dicapai terhadap sasaran yang ingin dicapai?	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah sasaran program/kegiatan tercapai? • Mengapa? • Bagaimana relevansi, keberlanjutan, dan efektivitas program dan kegiatan?
Lingkup	Komprehensif	Selektif
Metodologi	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan sasaran kepada indikator kinerja dan target • Mengukur kinerja dengan mengaitkan program/kegiatan, sumberdaya, target, tanggungjawab, dan hasil • Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan? 	Menilai faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan
Pelaksanaan	Dilaksanakan terus menerus atau berkala selama program dan kegiatan berjalan (kontinu)	Umumnya dilaksanakan pada pertengahan dan akhir program dan kegiatan
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kemajuan • Klarifikasi tujuan pelaksanaan program dan kegiatan • Peringatan dini terhadap permasalahan yang terjadi • Alat kontrol • Akuntabilitas penyampaian input program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memadukan hasil pembelajaran • Memberikan gambaran alternatif strategis • Akuntabilitas penggunaan sumberdaya • Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang

Sumber: Diadaptasi dari Castro (2007)

Sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan, berikut ini diuraikan definisi pengendalian, pemantauan/monitoring, dan evaluasi:

- **Pengendalian:** serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- **Pemantauan/Monitoring:** kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- **Evaluasi:** rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan target pembangunan.

5.2 ANALISIS MONITORING DAN EVALUASI MENGGUNAKAN SEPAKAT

5.2.1. SKEMA MODULAR MONITORING DAN EVALUASI DI APLIKASI SEPAKAT

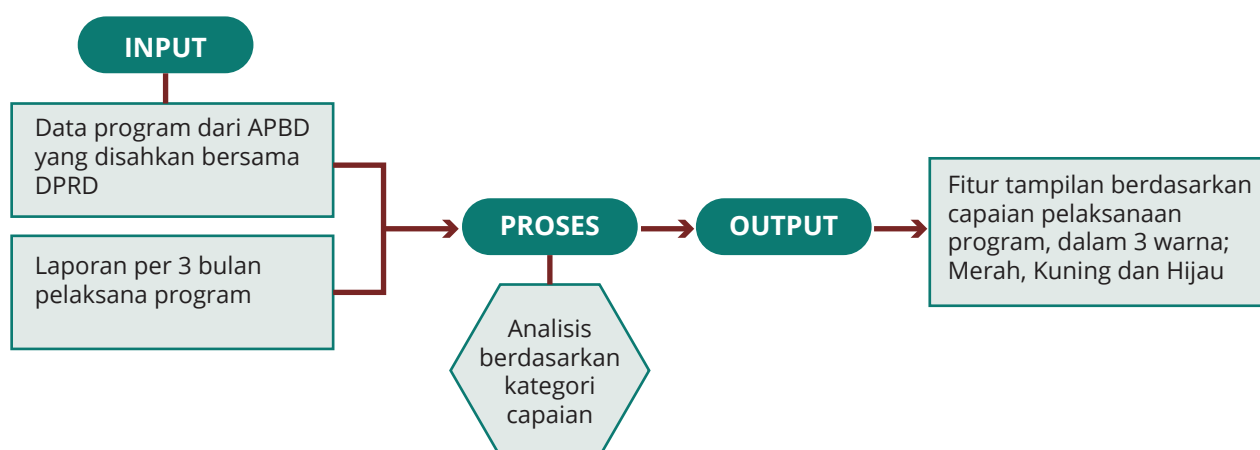
Analisis monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan daerah dengan aplikasi SEPAKAT menggunakan acuan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan kode formulir 2.2. Dokumen ini merupakan output dari proses perencanaan dan penganggaran, sekaligus menjadi acuan untuk input data di proses analisis monitoring dan evaluasi pada aplikasi SEPAKAT.

Sebagaimana layaknya sebuah aplikasi yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi, SEPAKAT 2.0 akan berbasis kepada mekanisme yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, mekanisme monitoring akan dilakukan berdasarkan pelaporan per 3 bulan dari masing-masing penanggungjawab pelaksana program penanggulangan kemiskinan di daerah dan evaluasi akan dilakukan di akhir tahun atau pada bulan 12 setiap tahun-nya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Masing-masing kepala SKPD/OPD melakukan pelaporan per triwulan atas pelaksanaan dari tugas yang dilaksanakan. Secara umum, pendanaan pemerintah berdasarkan wewenang terbagi menjadi 5 (lima), yaitu: Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Kantor Pusat, Kantor Daerah, dan Urusan Bersama. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat berdasarkan pelaksanaan atas pelimpahan wewenang di atas.

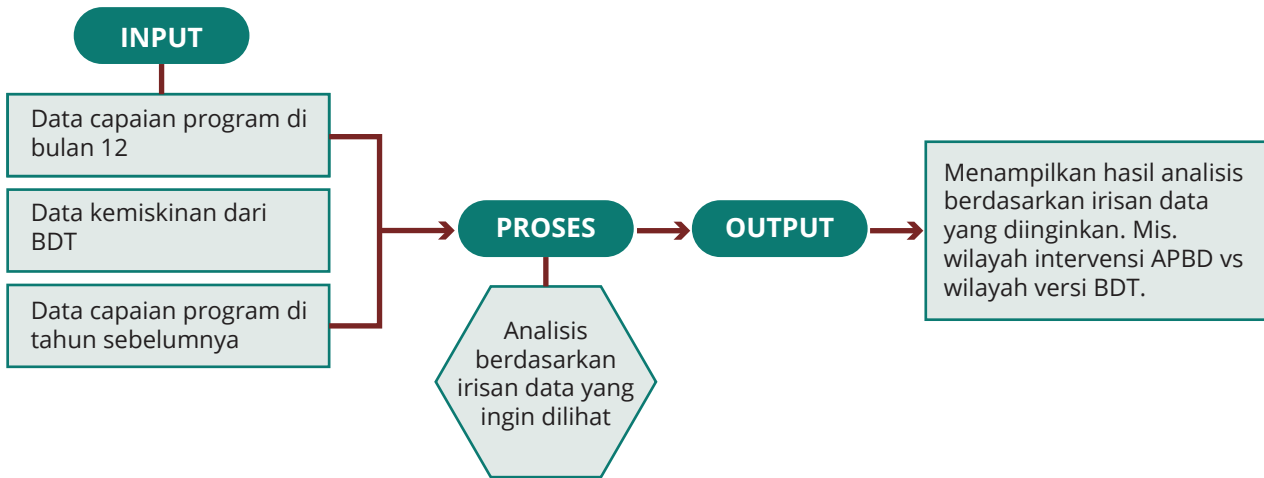
Secara umum, proses monitoring yang akan dibangun dalam aplikasi SEPAKAT untuk program pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

GRAFIK 10. PROSES MONITORING DI APLIKASI SEPAKAT



Sedangkan proses evaluasi akan mengikuti alur sederhana di bawah ini:

GRAFIK 11. PROSES EVALUASI DI APLIKASI SEPAKAT



5.2.2. MODULAR MONITORING DAN EVALUASI DI APLIKASI SEPAKAT

Modular monitoring di aplikasi SEPAKAT merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pemantauan status pencapaian dari realisasi program dan kegiatan yang direncanakan, baik dari kuantitatif (volume kegiatan dan anggaran) maupun lokasi yang diusulkan. Modular Monitoring dikembangkan berdasar output dari Modular Penganggaran; adapun Modular Evaluasi disusun berdasarkan output dari Analisis, Planning, Budgeting, dan Monitoring.

Dokumen acuan yang digunakan dalam analisis di modular monitoring adalah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) formulir 2.2 sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

TABEL 7. FORMULIR RKA 2.2.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir RKA - SKPD 2.2	
Provinsi/Kabupaten/Kota									
Tahun Anggaran									
Urusan Pemerintahan : X XX		W						
Organisasi : X XX XX		W						
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode Program Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Jumlah					Tahun n+1
				Tahun n			Tahun		
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8 10	
XX	Program								
	XX	Kegiatan	Ker	W		W	W		
	XX	Kegiatan							

Sebelum data DPA dapat dijadikan sebagai data program dan kegiatan yang disetujui, maka pemrosesan data melalui dua tahap, yaitu: (1) proses input data perencanaan menjadi data yang diusulkan yaitu berupa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); dan (2) proses data yang diusulkan menjadi anggaran program dan kegiatan yang telah disetujui berupa dokumen Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun kebutuhan data berdasarkan formulir DPA 2.2 untuk Pemerintah Daerah yang diolah melalui aplikasi SEPAKAT, meliputi:

- **Kode Program dan Kegiatan**, terdiri dari 5 item kode meliputi: (1) kode urusan pemerintahan; (2) kode organisasi; (3) kode sub unit organisasi; (4) kode program; dan (5) kode kegiatan.
- **Uraian**, menampilkan nama program dan kegiatan yang telah direncanakan.
- **Lokasi Kegiatan**, menampilkan lokasi kegiatan dengan cakupan wilayah berupa kecamatan.
- **Target Kinerja**, menunjukkan jumlah target kinerja yang ingin dicapai untuk setiap kegiatan yang direncanakan.
- **Sumber Dana**, menunjukkan sumber dana dari penganggaran untuk setiap kegiatan.
- **Jumlah Anggaran**, menunjukkan total anggaran untuk periode 1 tahun program dan kegiatan.

Aplikasi SEPAKAT menyediakan instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan update program (nama program atau kegiatan, jumlah sasaran, wilayah sasaran, dan jumlah anggaran) yang disahkan/disetujui untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran tahun berkaitan (dalam APBD) yang menjadi menu dari Modular Monitoring. Melalui proses update pelaksanaan program setiap 3 bulan sekali di Modular Monitoring, Pemerintah Daerah akan mengetahui:

- Program-program yang diakomodir oleh anggaran daerah;
- Jumlah sasaran masyarakat miskin yang direncanakan dikurangi;
- Jumlah wilayah yang menjadi target program;
- Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan;
- Perkembangan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat terpantau.

Proses input untuk melakukan analisis di Modular Monitoring dapat berasal dari 2 sumber data, yaitu:

1. Output dari Modular Perencanaan (Form DPA 2.2); dan
2. Isian Manual dari User dengan Form DPA 2.2. Data yang diinput berasal dari Data Program dan Anggaran yang disetujui dalam APBD.

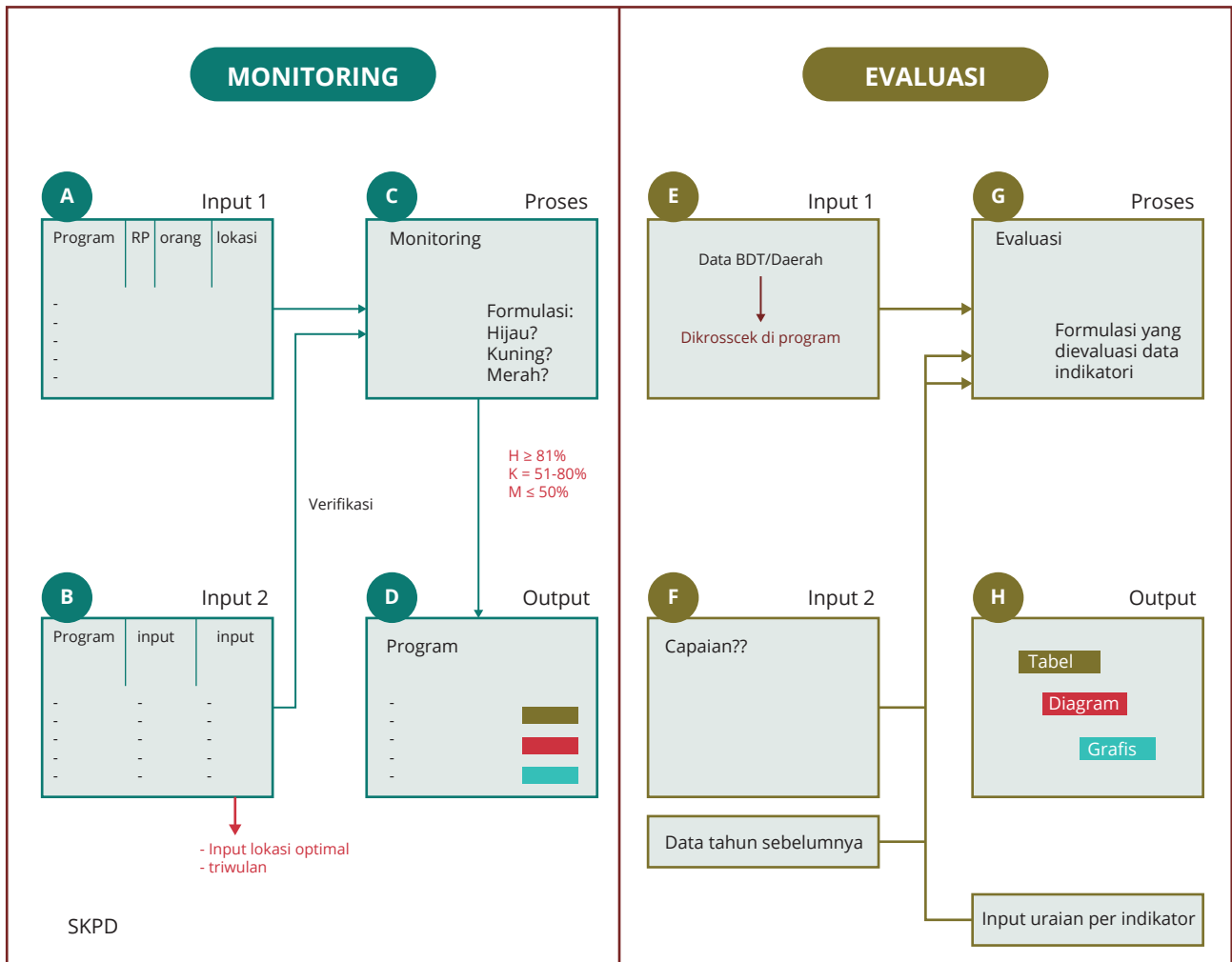
Setelah proses input data telah dilakukan dan ditampilkan di menu "Input Monitoring", selanjutnya proses monitoring terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan akan berbasiskan data input manual yang akan diupdate oleh Pemerintah Daerah tiap 3 bulan sekali (per triwulan). Proses analisis yang disajikan di modular monitoring adalah untuk menampilkan *gap* antara program dan anggaran yang diusulkan dengan dokumen yang disahkan.

Modular Evaluasi akan diolah menghasilkan tingkat kepatuhan dan efektifitas pemakaian data kemiskinan. Pemakaian data kemiskinan yang diolah di modular evaluasi tersebut digunakan untuk:

- Penyusunan program di daerah
- Mengetahui *gap* antara perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan/pengesahan
- Mengetahui tingkat pencapaian penurunan angka kemiskinan tahun berkaitan
- Penyusunan rekomendasi untuk perencanaan tahun selanjutnya.

Gambaran tentang alur data pada Modular Monitoring dan Evaluasi bisa dilihat dalam bagan berikut:

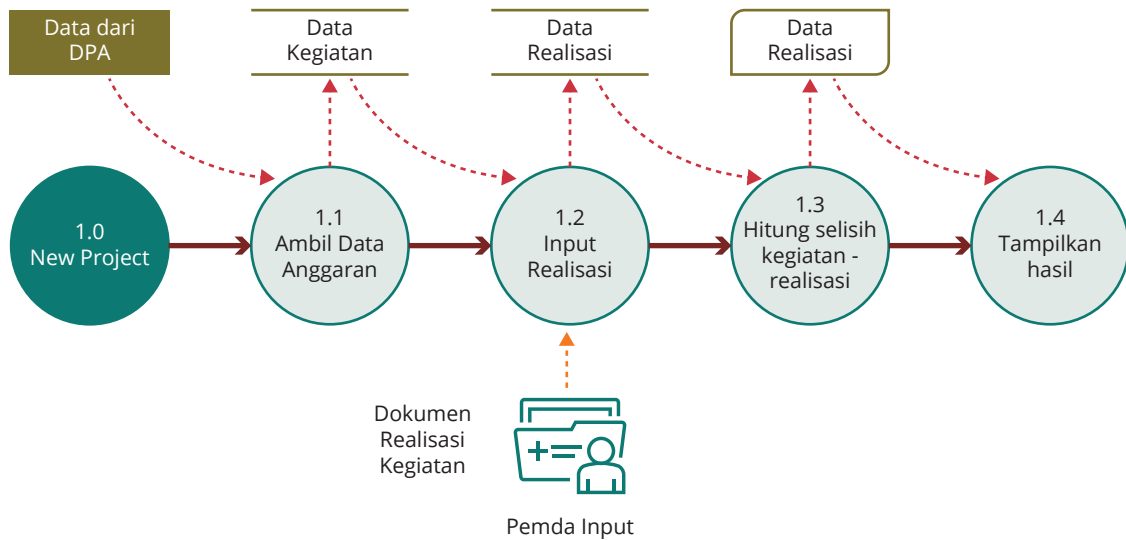
GRAFIK 12. BAGAN ALUR DATA MODULAR MONITORING DAN MODULAR EVALUASI



Adapun gambaran peta proses analisis yang dilakukan di Modular Monitoring dan Evaluasi dapat terlihat pada diagram berikut:

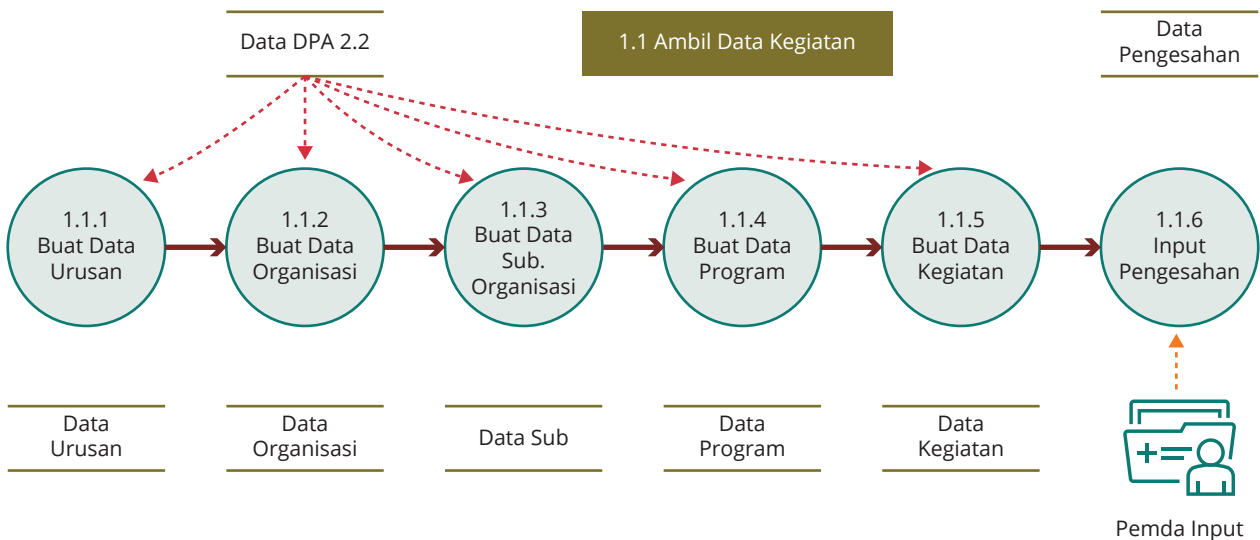
1. MONITORING

GRAFIK 13. **DIAGRAM UMUM MONITORING**



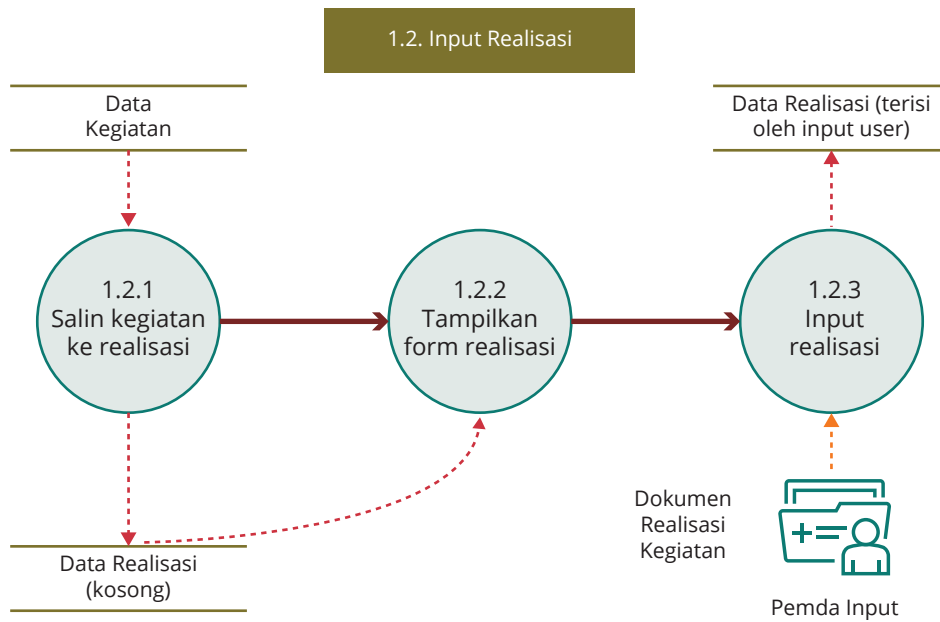
2. BANGUN DATA (DENGAN MENGAMBIL DARI DATA DPA 2.2.)

GRAFIK 14. **INPUT DATA PROGRAM DAN KEGIATAN DARI DPA 2.2.**



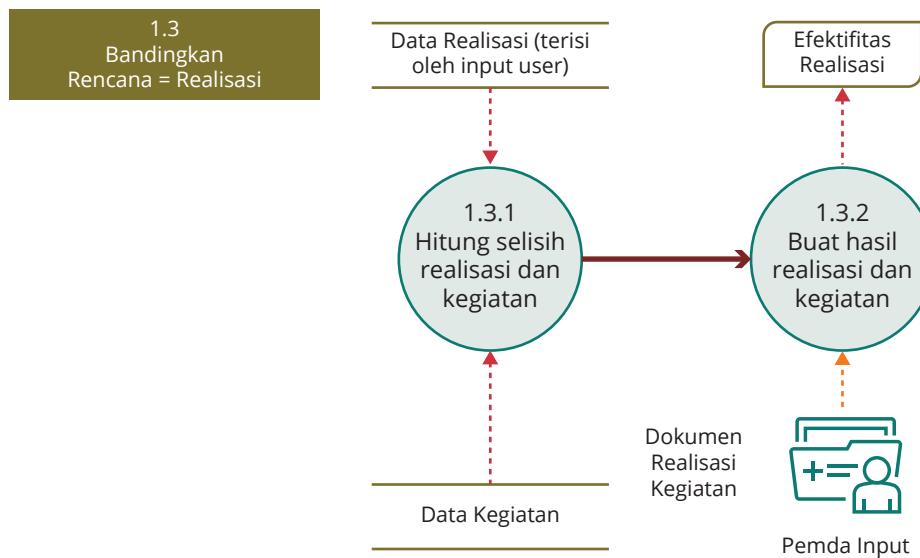
3. INPUT REALISASI BELANJA

GRAFIK 15. SKEMA INPUT REALISASI KEGIATAN



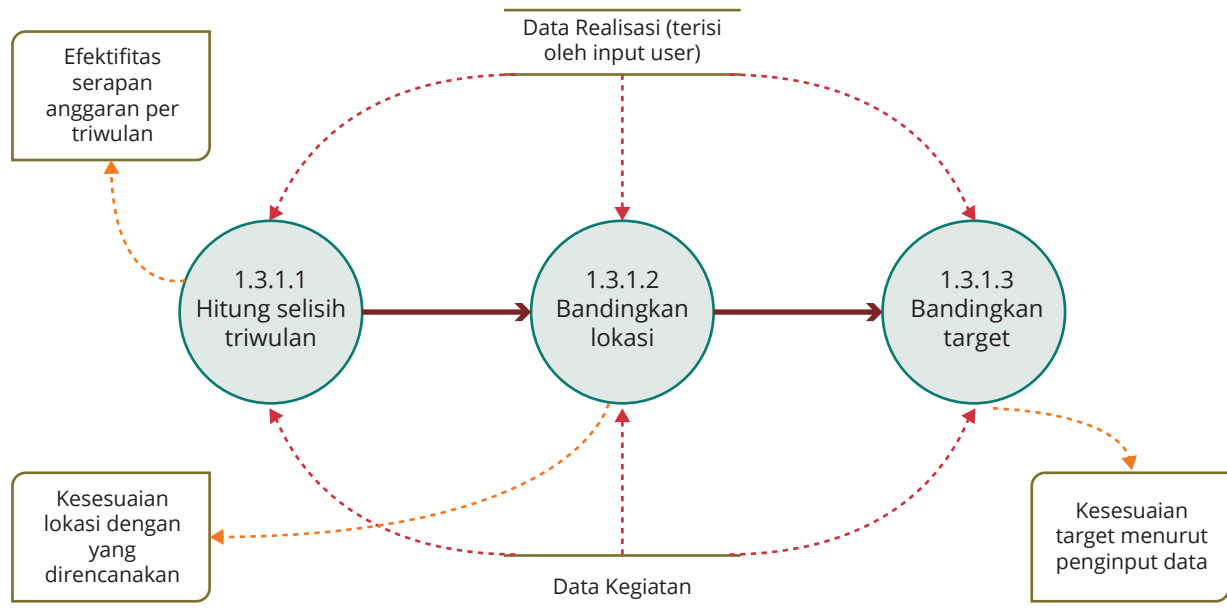
4. PERBANDINGAN RENCANA - REALISASI

GRAFIK 16. PERBANDINGAN RENCANA – REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN



5. PENGHITUNGAN RENCANA – REALISASI

GRAFIK 17. PERHITUNGAN TINGKAT REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN (RENCANA VS REALISASI)



Monitoring SEPAKAT dirancang untuk mengukur kemajuan pencapaian pembangunan daerah dibandingkan dengan target pembangunan setiap tahun (RKPD) maupun lima tahun (RPJMD). Indikator yang diukur adalah indikator-indikator yang erat hubungannya dengan isu inklusif dan kemiskinan. Aplikasi monitoring SEPAKAT dibangun berdasarkan kerangka pikir sebagai berikut:

- Membandingkan capaian kinerja vs target pembangunan
- Membandingkan capaian kinerja antar berbagai tema pembangunan (SDGs)
- Merekomendasikan tindakan perbaikan

Beberapa ketentuan pengukuran capaian kinerja Pemda menggunakan SEPAKAT:

- Berisi indikator pilihan, yaitu indikator terkait kemiskinan dalam lingkup tiga area strategis pelayanan dasar, perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi
- Target pembangunan Pemda mengacu pada RPJMD (5 tahunan), RKPD (1 tahunan) dan SDGs (Provinsi)
- Data capaian pembangunan (kinerja) Pemda per tahun bersumber dari data BPS (Susenas, Sakernas) maupun data sektor (Riskedas, Prov/Kab Dalam Angka, Profil Pendidikan, Profil Kesehatan)
- Penilaian kinerja Pemda dilakukan dengan penilaian/ scoring berdasarkan ketentuan yang sudah dilaksanakan secara reguler oleh Pemda (contoh: mengacu pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban/LKPJ), atau sebagai berikut:

a. Untuk Indikator bersifat *maksimal* (semakin besar pencapaian semakin baik)

Persentase Kinerja Pemda

$$= \left[\frac{\text{Capaian Tahun } n}{\text{Target Tahun } n} \right] \times 100\%$$

b. Untuk Indikator bersifat *minimal* (semakin kecil pencapaian semakin baik)

Persentase Kinerja Pemda

$$= \left[1 - \frac{\text{Capaian Tahun } n}{\text{Target Tahun } n} \right] \times 100\%$$

- Sementara untuk pewarnaan pencapaian pembangunan mengacu pada penghitungan SEPAKAT dengan metode effort variance/ menghitung upaya yang dilakukan.

a. Untuk Indikator bersifat maksimal (semakin besar pencapaian semakin baik)

$$= \left[\frac{\text{Capaian Tahun } n - \text{Baseline Tahun } n}{\text{Target Tahun } n - \text{Baseline Tahun } n} \right] \times 100\%$$

b. Untuk Indikator bersifat minimal (semakin kecil pencapaian semakin baik)

$$= \left[\frac{1 - \text{Capaian Tahun } n - \text{Baseline Tahun } n}{1 - \text{Target Tahun } n - \text{Baseline Tahun } n} \right] \times 100\%$$

- $X \geq 1$
- $0.75 \leq X < 1$
- $X < 0.75$

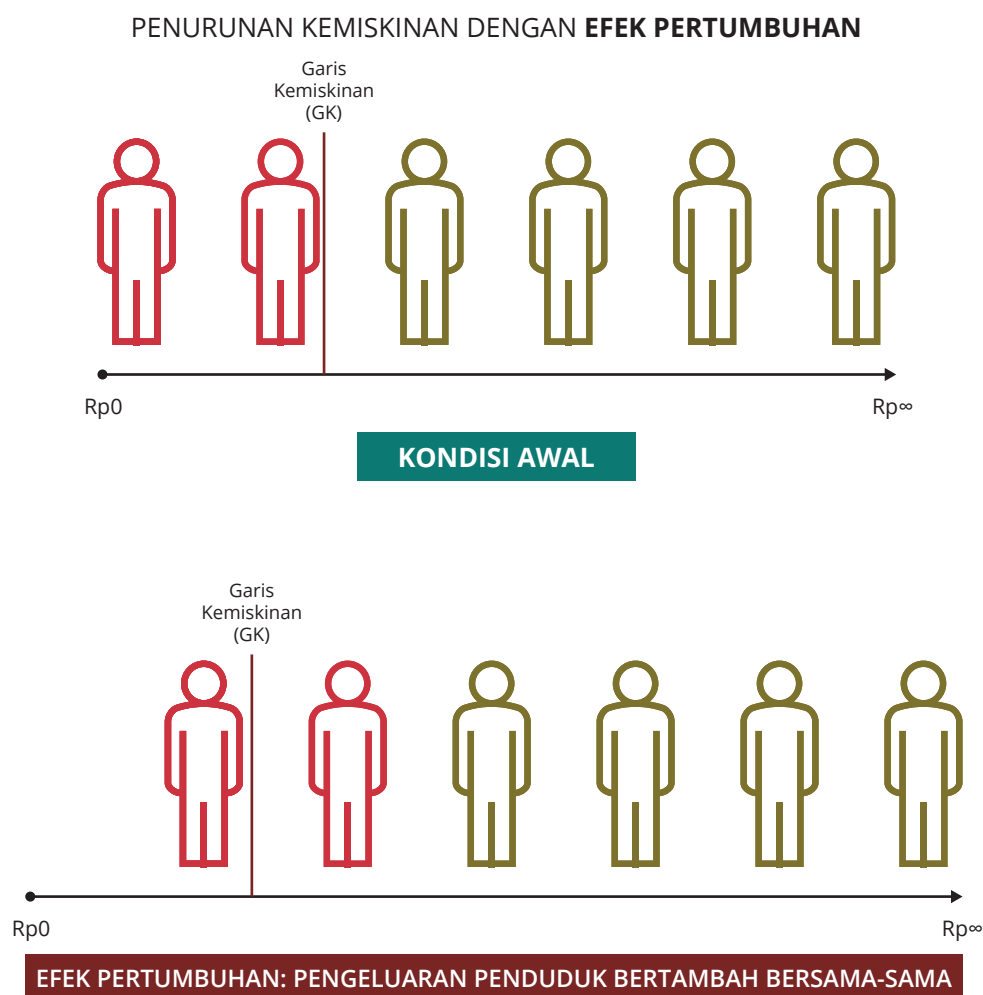
5.3 MODUL EVALUASI

Modul Evaluasi dalam SEPAKAT bertujuan untuk mengukur kinerja penurunan kemiskinan di tingkat daerah, serta dibandingkan daerah lain yang setara, apakah kinerjanya sudah cukup baik atau masih perlu ditingkatkan. Kinerja penurunan kemiskinan itu sendiri diukur berdasarkan dekomposisi penurunan kemiskinan menjadi efek Pertumbuhan dan efek Redistribusi, menggunakan metode dekomposisi oleh Datt & Ravallion (1992). Penyetaraan konteks daerah dilakukan berdasarkan karakteristik yang mirip dari masing-masing daerah, dan perbandingan daerah diukur berdasarkan indeks linear kinerja penurunan kemiskinan bernama *Poverty Bias of Growth* (PBG), yang dicetuskan oleh McCulloch & Baulch (2000).

Penilaian kinerja penurunan kemiskinan penting untuk diketahui Pemerintah Daerah, karena salah satu fungsi dari negara/pemerintahan adalah fungsi redistribusi (DJPK Kemenkeu, 2018). Hasil penilaian Efek Redistribusi dari hasil evaluasi kinerja penurunan kemiskinan yang masih rendah, atau bahkan tidak berkontribusi pada penurunan kemiskinan, menunjukkan perlunya usaha yang lebih giat dari Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan instrumen fiskal daerah. Jika hasil Modul Evaluasi menunjukkan kinerja penurunan kemiskinan yang kurang optimal, pengguna disarankan untuk kembali ke Modul Analisis dan mengeksplorasi isu yang dihadapi masyarakat miskin dan rentan. Modul Analisis memuat informasi terkait ekonomi produktif dan ketenagakerjaan, untuk meningkatkan efek Pertumbuhan, dan juga informasi terkait pelayanan dasar dan akses, untuk meningkatkan efek Redistribusi.

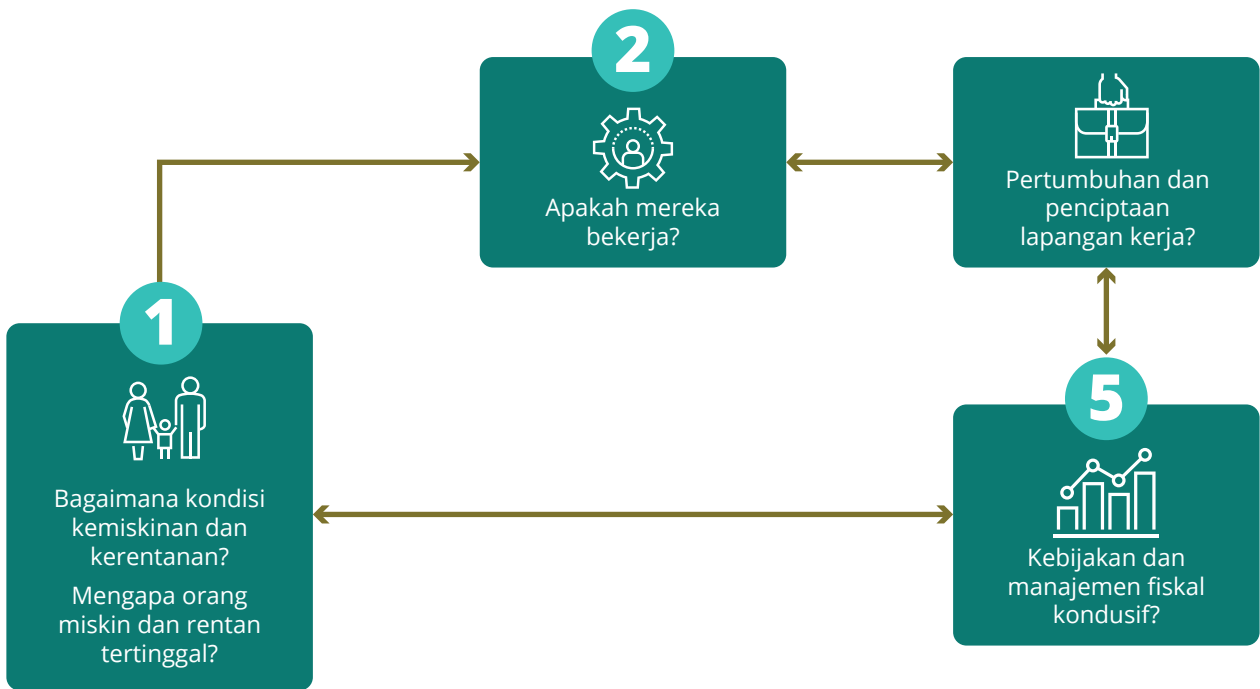
5.3.1 EFEK PERTUMBUHAN

Secara teknis, Efek Pertumbuhan adalah perubahan dalam tingkat kemiskinan yang terobservasi saat kurva Lorenz tidak bergeser (Ravallion, 2016)².



² Ravallion, M. (2016). The Economics of Poverty: History, measurement and policy. New York: Oxford University Press.

PROSES DALAM SEPAKAT: **EFEK PERTUMBUHAN**



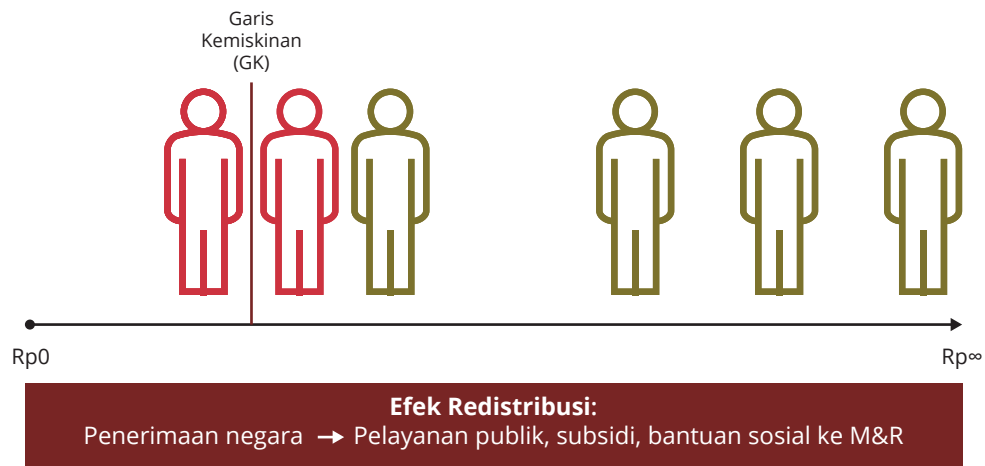
5.3.2 EFEK REDISTRIBUSI

Secara teknis, Efek Redistribusi adalah perubahan dalam tingkat kemiskinan yang terobservasi saat rerata pengeluaran penduduk tidak bergeser (Ravallion, 2016)³.

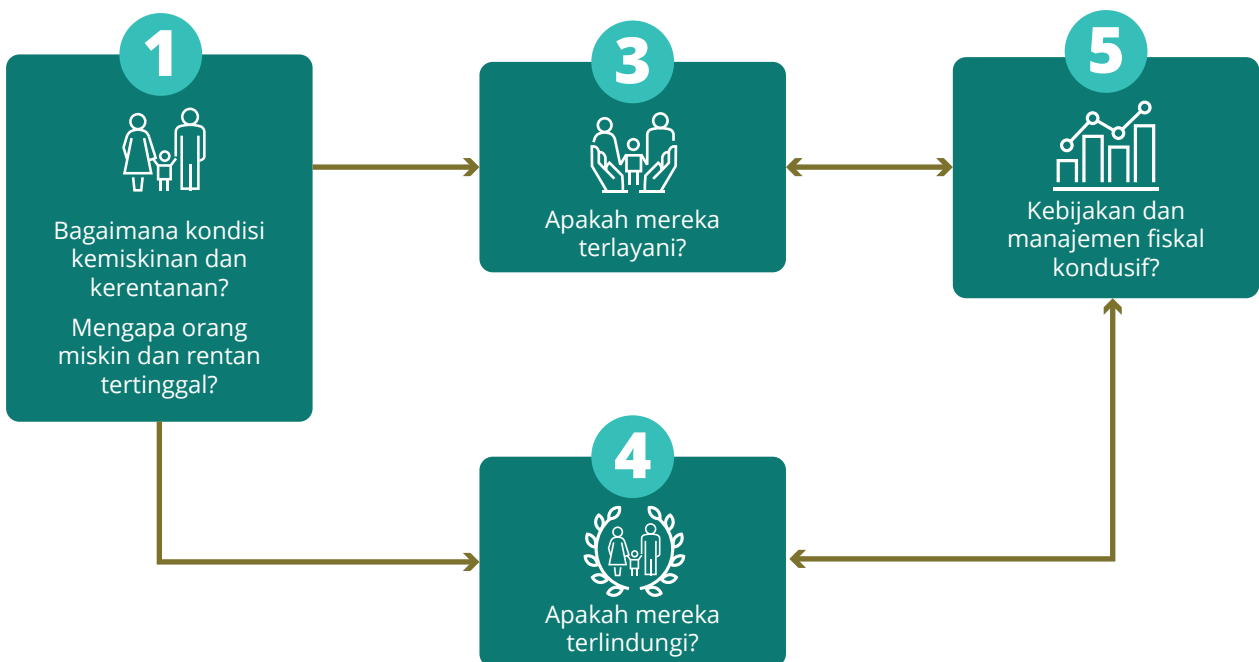


³ Ravallion, M. (2016). The Economics of Poverty: History, measurement and policy. New York: Oxford University Press.

PENURUNAN KEMISKINAN DENGAN EFEK REDISTRIBUSI



PROSES DALAM SEPAKAT: EFEK REDISTRIBUSI



5.3.3 NORMALISED POVERTY BIAS OF GROWTH (NORMALISED PBG)

Berangkat dari dekomposisi penurunan kemiskinan, Poverty Bias of Growth (PBG) adalah sebuah indikator yang mencoba mengukur tingkat keberpihakan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan (McCulloch & Baulch, 1999)⁴. Perhitungan dari PBG adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PBG} &= \text{Poverty reduction with distributionally neutral growth} \\ &\quad - \text{Poverty reduction which actually occurred} \\ &= \Delta P\mu - \Delta P \\ &= -\Delta P\psi \end{aligned}$$

Di mana:

- ΔP menunjukkan penurunan angka kemiskinan;
- $\Delta P\mu$ menunjukkan Efek Pertumbuhan standar hidup (dalam konteks Indonesia, pertumbuhan pengeluaran perkapita); dan
- $\Delta P\psi$ menunjukkan Efek Redistribusi.

Dengan kata lain, PBG menunjukkan efek redistribusi yang dikalikan -1. Apabila PBG bernilai positif, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan. Sebaliknya apabila bernilai negatif, pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut lebih berpihak kepada masyarakat kaya.

Pengukuran PBG dapat memberikan penilaian terhadap kinerja penurunan angka kemiskinan antar 2 titik waktu. Namun, besarnya nilai PBG akan dipengaruhi oleh jarak antar kedua titik waktu tersebut. Maka, McCulloch dan Baulch (1999) di paper yang sama juga mengajukan pengukuran PBG yang dinormalisasi, atau lazim disebut dengan *Normalised Poverty Bias of Growth (Normalised PBG)*. Perhitungan *Normalised PBG* adalah sebagai berikut:

$$\text{Normalised PBG} = \frac{-\Delta P\psi}{[\Delta P\mu]}$$

Penilaian *Normalised PBG* dapat diperbandingkan antar daerah meskipun memakai patokan waktu yang berbeda, dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja penurunan kemiskinan secara relatif.

⁴ McCulloch, N. & Baulch, B. (1999) "Assessing the Poverty Bias of Growth Methodology and an Application to Andhra Pradesh and Uttar Pradesh", IDS Working Paper 98, Brighton: IDS.

5.3.4 KONSEP PENURUNAN KEMISKINAN

Berdasarkan dinamika standar hidup, perubahan status kemiskinan dapat terjadi melalui 2 jalur, yaitu:

1. Jalur Pertumbuhan

Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah pertumbuhan pengeluaran atau pemasukan yang menjadi pengukur standar hidup di daerah. Indonesia sendiri menggunakan rata-rata pengeluaran bulanan per kapita sebagai basis pengukuran standar hidupnya, di mana batas kemiskinan ditentukan oleh Garis Kemiskinan, yaitu pengeluaran minimal yang harus dipenuhi demi mendapat standar hidup layak.

Efek Pertumbuhan dianggap positif berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (+) apabila rata-rata pengeluaran bulanan per kapita sekelompok individu miskin dapat bertambah melebihi Garis Kemiskinan, sehingga mereka menjadi tidak miskin.

Sebaliknya, efek pertumbuhan dianggap negatif berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (-) apabila penambahan rata-rata pengeluaran bulanan per kapita sekelompok individu miskin masih tidak dapat mengimbangi penambahan Garis Kemiskinan, sehingga mereka tetap miskin.

2. Jalur Redistribusi

Redistribusi di sini adalah proses re-distribusi, di mana “distribusi” bermaksud untuk menggambarkan distribusi/penyebaran rata-rata pengeluaran bulanan per kapita di daerah. Redistribusi merupakan proses di mana persebaran rata-rata pengeluaran bulanan per kapita di daerah tersebut dimodifikasi, dengan mentransfer sebagian rata-rata pengeluaran bulanan per kapita daerah dari kelompok individu kaya ke kelompok individu miskin.

Jalur redistribusi dapat dilaksanakan oleh pemerintah

Pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan proses redistribusi ini, dengan cara menetapkan pajak dan retribusi untuk memotong pengeluaran bulanan kelompok individu kaya, dan hasil pemotongannya diberikan ke kelompok individu miskin dalam bentuk subsidi, bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur yang dapat dipergunakan oleh kelompok individu miskin.

Efek Redistribusi dianggap positif berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (+) apabila tambahan transfer pengeluaran bulanan per kapita dari kelompok individu kaya ke kelompok individu miskin berhasil membuat pengeluaran kelompok individu miskin berada di atas Garis Kemiskinan, sehingga mereka menjadi tidak miskin.

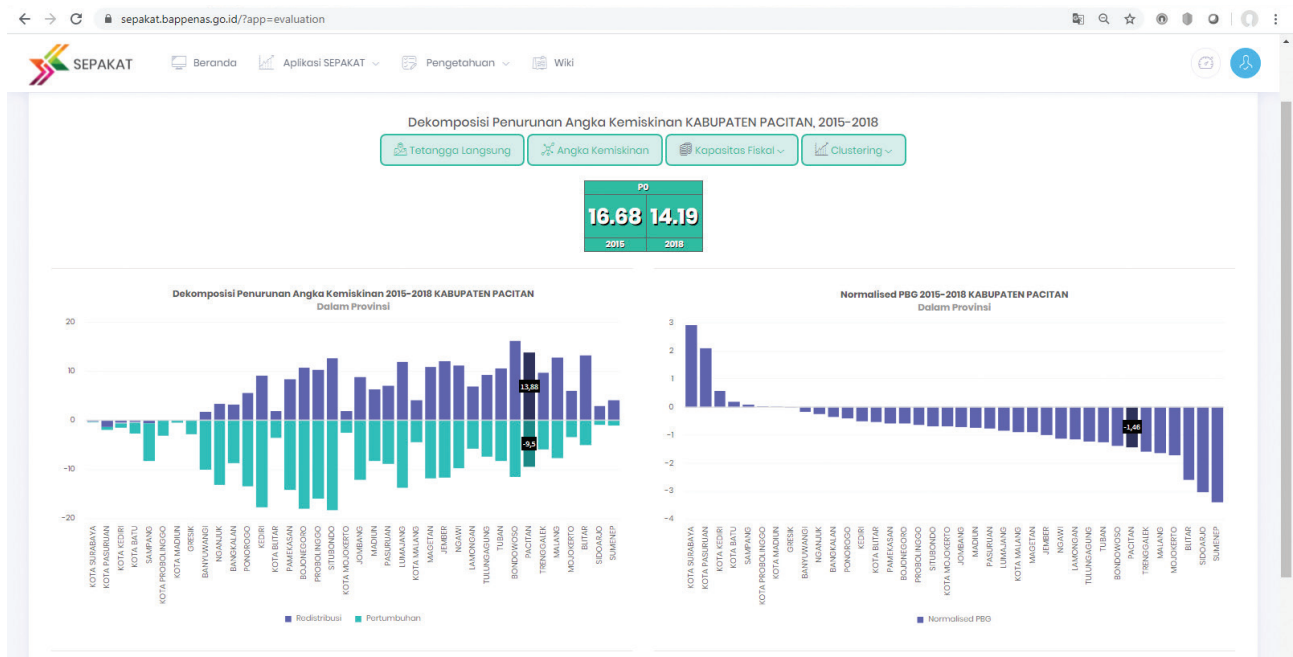
Sebaliknya, Efek Redistribusi dianggap negatif berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan (-) apabila tambahan transfer pengeluaran bulanan per kapita dari kelompok individu kaya ke kelompok individu miskin belum membuat pengeluaran kelompok individu miskin menjadi berada di atas Garis Kemiskinan, sehingga mereka tetap miskin.

Di dunia nyata, kedua efek ini selalu berjalan secara berdampingan, sehingga efeknya tidak dapat dibedakan secara langsung. Namun di atas kertas, apabila data yang digunakan tersedia, kedua efeknya dapat dipisahkan satu sama lain. Cara pemisahan ini lebih dikenal sebagai dekomposisi.

Idealnya, baik Efek Redistribusi maupun Efek Pertumbuhan bernilai NEGATIF (<0). Hal ini menunjukkan kedua efek berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Nilai yang positif menunjukkan indikasi isu:

Efek Pertumbuhan	Efek Redistribusi
Pertumbuhan ekonomi tidak inklusif miskin.	Alokasi anggaran untuk M&R kurang tepat guna dan tepat sasaran. Pemberian subsidi/bansos kurang tepat sasaran.



Idealnya, baik Efek Redistribusi maupun Efek Pertumbuhan bernilai negatif (<0).

Artinya, kedua efek berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

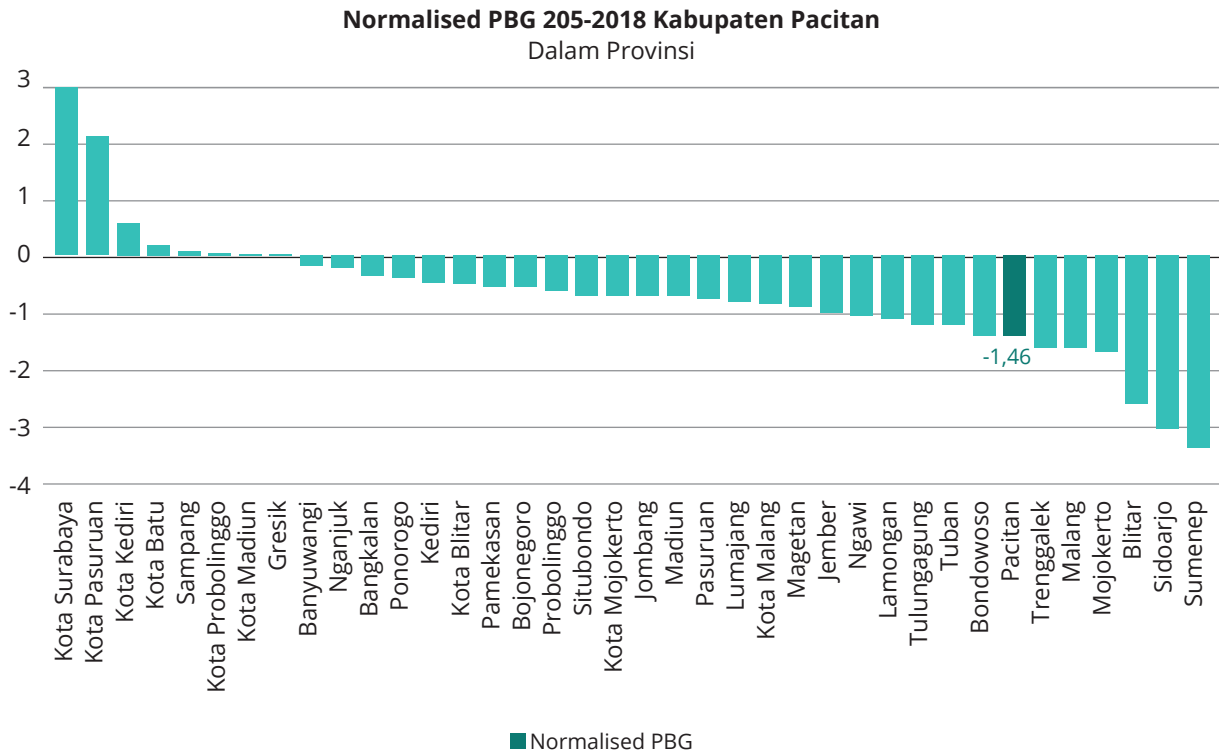
Apabila Efek Pertumbuhan bernilai positif (>0), terdapat indikasi masalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi tidak inklusif miskin.

Sedangkan apabila Efek Redistribusi bernilai positif (>0), terdapat masalah sebagai berikut:

- Alokasi anggaran untuk kaum miskin dan rentan kurang tepat guna dan tepat sasaran.
- Pemberian subsidi/bansos untuk kaum miskin dan rentan kurang tepat sasaran.

Pengguna disarankan kembali ke Modul Analisis untuk menemukan akar masalah terkait penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.



Selain dekomposisi angka kemiskinan, SEPAKAT juga memberikan indikasi untuk daerah yang kinerja penurunan kemiskinannya sudah tepat sasaran. Daerah yang memiliki nilai Normalised PBG yang positif (>0) adalah daerah yang kinerja penurunan kemiskinannya sudah baik, dan dapat dijadikan percontohan untuk praktek baik. Sedangkan daerah yang memiliki nilai Normalised PBG yang negatif (<0) harus lebih giat dalam menurunkan kemiskinan, dan dapat dijadikan percontohan untuk pembelajaran.

BAB 6

Manajemen Pengetahuan



PETUNJUK PEMBELAJARAN MANAJEMEN PENGETAHUAN



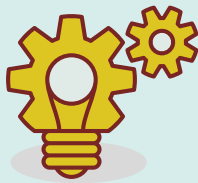
TUJUAN:

Setelah penyajian materi ini, peserta diharapkan dapat memahami tentang berbagai fitur SEPAKAT terkait Manajemen Pengetahuan, seperti bagaimana mendapatkan pengetahuan, mengaplikasikannya dan memanfaatkannya serta saling berbagi pengalaman.



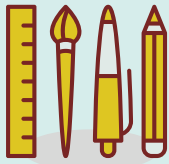
WAKTU:

1 X 45 Menit



METODE:

- Ceramah
- Curah Pendapat



MEDIA:

- LCD Projector
- Laptop/Komputer



SUMBER REFERENSI:

- Bahan Paparan Manajemen Pengetahuan SEPAKAT



HANDOUT:

- Presentasi PowerPoint
- Handout/Flyer SEPAKAT

6.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa berlangsung dengan sangat cepatnya. Pun demikian dengan Inovasi yang dihasilkan oleh manusia juga semakin berkembang. Fenomena dapat kita rasakan pada kehidupan sehari-hari pada saat ini. Teknologi semakin merangsek menjadi sebuah kebutuhan yang sulit terhindarkan. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dari kemunculan berbagai inovasi ini juga menjadi keniscayaan.

Pada dasarnya semua ini adalah pengejawantahan dari adanya dinamika masalah dan kebutuhan hidup manusia yang selalu hadir dan semakin meningkat. Berbagai teknologi dan inovasi hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Tetapi, pada hal yang lain proses inovasi dan pembaruan yang terus berkembang dan berkesinambungan tersebut membutuhkan adanya sarana atau kegiatan yang mampu memfasilitasi setiap orang untuk dapat menyampaikan gagasan atau pengalamannya. Pengembangan pengetahuan dalam organisasi adalah faktor penentu eksistensi sebuah organisasi. Pengetahuan dan pembelajaran adalah dua hal yang menjadi sesuatu yang niscaya dibutuhkan dalam setiap perubahan atau perkembangan lingkungan.

Hasil riset Delphi Group menunjukkan bahwa pengetahuan atau *knowledge* dalam organisasi dijelaskan sebagai 42 % tersimpan dan terstruktur dipikiran atau otak individu, 26 % pada dokumen kertas, 20 % pada dokumen elektronik dan 12 % berupa *knowledge base* elektronik (Setiarso, 2009)⁵. Berdasarkan hasil riset ini, 42 % pengetahuan yang masih berada dipikiran atau otak masing-masing individu perlu mendapatkan ruang atau sarana yang baik sehingga dapat disampaikan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Upaya ini, tidak hanya diharapkan untuk menambah pengetahuan atau informasi orang tersebut, tetapi juga untuk mendorong lahirnya ide atau gagasan baru untuk menciptakan produk atau sistem baru dan juga melakukan perbaikan pada produk atau sistem yang lama. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan manajemen pengetahuan atau *knowledge management*.

6.2 DEFINISI DAN KONSEP MANAJEMEN PENGETAHUAN

Terminologi pengetahuan (*knowledge*) pertama kali diperkenalkan oleh Henry pada tahun 1974 yang mengungkapkan adanya perbedaan makna dan adanya transisi dari data, informasi hingga menjadi *knowledge* (Wallace, 2007)⁶. Menurut Nonaka dan Takeuchi (2004) untuk menunjang era revolusi informasi ini, suatu organisasi perlu memiliki pengetahuan eksplisit (*know why*) dan pengetahuan tasit (*know how*)⁷. *Tacit knowledge* yaitu pengetahuan yang berbentuk *know-how*, berdasarkan pengalaman, kemampuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu masalah yang pernah dihadapi. Kedua, *explicit knowledge* yaitu pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar (cetak maupun elektronik) dan bisa sebagai bahan pembelajaran (*reference*) untuk orang lain. Pengelolaan dari *explicit knowledge* ini menjadi lebih mudah karena sudah tercetak dalam bentuk buku, blog ataupun dokumentasi yang tersimpan. Sedangkan pengelolaan untuk *tacit knowledge* lebih sulit karena masih tersimpan dalam pikiran beberapa orang.

5 Setiarso, Bambang, dkk., 2009. Penerapan Knowledge Management Pada Organisasi, Graha Ilmu, Yogyakarta.

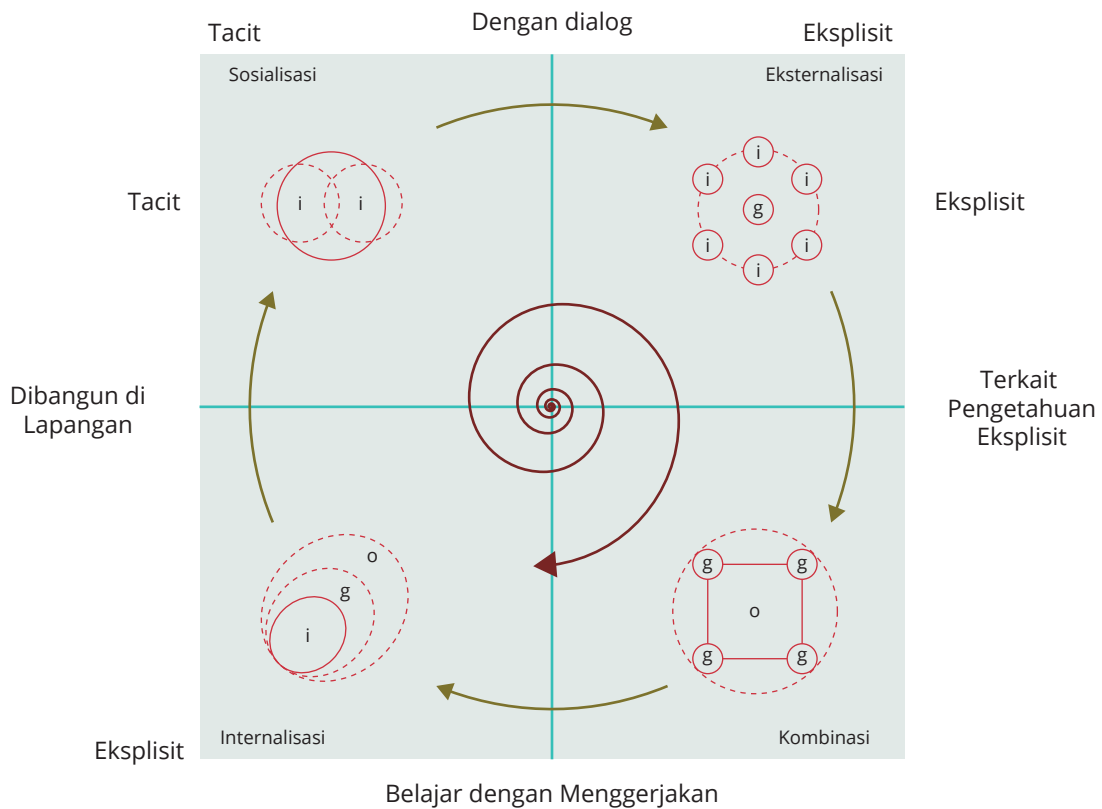
6 Priyandari, 2012, Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), priyandari.staff.uns.ac.id diakses pada 20 Maret 2010

7 Tjakraatmadja, Jann Hidajat dan Donald Crestofel Lantu, 2006, Knowledge Management dalam Konteks Organisasi Pembelajar, Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB, Cetakan I, Bandung.

Adapun istilah manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang dikenal luas saat ini adalah suatu pengelolaan sumber daya untuk dapat menangkap, menyimpan, menyebarkan dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki organisasi untuk menjadikan organisasi lebih baik dari waktu ke waktu (Smith dalam Wallace 2007; Dalkir, 2005; Nonaka dan Takeuchi, 1995)⁸. Senada dengan definisi ini, Groff & Jones (2003) mengemukakan definisi *knowledge management* adalah alat, teknik, strategi untuk menyimpan, menganalisis, mengorganisir, meningkatkan dan membagikan pengalaman⁹. Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan pengertian konsep *knowledge management* yaitu suatu sistem atau alat untuk mengelola sumber daya (aset organisasi) tidak berwujud (pengetahuan) untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Liebowitz (1999), dalam penerapan *knowledge management* terdapat tiga proses dasar, yaitu: pertama, penciptaan pengetahuan (*knowledge creation*); kedua, pembagian pengetahuan (*knowledge sharing*), dan ketiga adalah penerapan pengetahuan (*knowledge implementing*). Penciptaan pengetahuan dilakukan dengan proses yang dijelaskan dalam diagram berikut ini:

GRAFIK 18. **PENCIPTAAN KNOWLEDGE MANAGEMENT MODEL NONAKA DAN TAKEUCHI**



Sumber: Tung (2018)¹⁰

8 Priyandari, 2012, Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), priyandari.staff.uns.ac.id diakses pada 28 Desember 2020
 9 Kurniawati, Susanti, Knowledge Managenent, <http://file.upi.edu> diakses pada 28 Desember 2020
 10 Tung, Khoe Yao, 2018, Memahami Knowledge Management, Indeks, Cetakan I, Jakarta.

Berdasarkan gambar di atas, proses penciptaan pengetahuan terdiri dari: *socialization* (sosialisasi), *externalization* (eksternalisasi), *combination* (kombinasi), dan *internalization* (internalisasi) atau biasa disingkat sebagai SECI.¹¹

Proses **sosialisasi** merupakan proses perubahan pengetahuan dari *tacit knowledge* individual ke *tacit knowledge* organisasional. Proses perubahan ini dapat terjadi melalui proses sosialisasi atau proses "*sympathized knowledge*", yaitu proses berbagi pengetahuan, berbagi visi dan berbagi model mental antar individu untuk menciptakan pengetahuan *tacit* organisasional yang baru. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka seperti rapat, diskusi, pertemuan bulanan, pendidikan dan pelatihan (*training*) dengan mengubah *tacit trainer* menjadi *tacit knowledge* para peserta.

Sementara untuk proses **eksternalisasi**, atau seringkali juga disebut sebagai proses "*operational knowledge*" merupakan pemindahan pengetahuan dari *tacit knowledge* ke *explicit knowledge*. Proses eksternalisasi dapat terwujud di antaranya melalui pendokumentasian notulen rapat, hasil diskusi (yang merupakan bentuk eksplisit dari *knowledge* yang tercipta saat diadakannya pertemuan/sosialisasi) atau hasil pelatihan untuk kemudian disimpan dan dipublikasikan bagi yang membutuhkan melalui sistem informasi yang ada di organisasi.

Kemudian untuk proses **kombinasi** terjadi dalam pemindahan *explicit knowledge* kelompok ditransfer menjadi *explicit knowledge* organisasi dilakukan dengan proses kombinasi dengan aktivitas memilah, menambahkan, melakukan kategorisasi dan memilih metodologi praktek terbaik. Pembuatan manual atau panduan adalah salah satu contoh kegiatan dalam tahapan ini.

Sedangkan proses **internalisasi** terbentuk melalui perubahan *explicit knowledge* ke *tacit knowledge*. Proses internalisasi dilakukan melalui proses pelatihan yang kemudian dipadukan dengan pengalaman yang telah didapatkan selama ini. Dengan demikian, proses berbagi pengetahuan ini akan menginspirasi dan membuat seseorang atau individu akan mendapatkan pengetahuan yang baru, yaitu pengetahuan dengan pengalaman sukses. Hal ini akan membuat tujuan manajemen pengetahuan tercapai dan membuat pengetahuan terinternalisasi.

11 Ibid.

6.3 MANAJEMEN PENGETAHUAN SEPAKAT

Penerapan Manajemen Pengetahuan pada SEPAKAT dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yang dijelaskan dibagian bawah berikut ini.

KEGIATAN PENCIPTAAN PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE CREATION*)

Kegiatan penciptaan pengetahuan dilakukan melalui kegiatan SECI (Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi dan Internalisasi).

1. Proses **sosialisasi** dilakukan melalui pembicaraan informal best practices exchange diantara tim SEPAKAT, observasi, dialog dengan para stakeholders dan pengalaman lembaga lainnya. Proses sosialisasi ini juga dilakukan oleh anggota tim SEPAKAT yang telah berpengalaman sebelumnya dengan membagikan pengetahuan ataupun informasi yang didapatkan kepada anggota tim SEPAKAT lainnya. Dengan demikian, *knowledge* atau pengetahuan karyawan tersebut dapat ditransfer menjadi pengetahuan bersama.
2. Proses **eksternalisasi** dilakukan melalui pendokumentasian hasil kegiatan *knowledge sharing* pada tahap sosialisasi kedalam bentuk konsep-konsep atau sistem yang terdokumentasi dengan terstruktur agar nantinya mudah dimengerti oleh orang lain yang membacanya ataupun bisa dimanfaatkan kembali jika diperlukan serta juga dapat dipublikasikan kepada mereka yang berkepentingan. Proses eksternalisasi ini dilakukan dengan menyusun Web Aplikasi SEPAKAT.
3. Proses **kombinasi** dilakukan dengan melakukan penyusunan sistem knowledge management berdasarkan pada topik, penerapan konsep dalam misi dan operasionalisasi konsep dalam fungsi manajemen. Proses kombinasi merupakan perubahan pengetahuan dari *explicit knowledge* menjadi *explicit knowledge*. Jadi pengetahuan yang sudah terdokumentasikan melalui proses eksternalisasi diatas, kembali dibagikan pihak-pihak lain untuk saling bertukar informasi atau pengetahuan. Proses kombinasi ini juga bisa dilakukan dengan cara mengkombinasikan berbagai *explicit knowledge* yang berbeda kemudian disusun ke dalam sistem knowledge management. Data yang telah disimpan dalam sistem SEPAKAT diolah sehingga menjadi fitur-fitur portal yang memiliki fungsi untuk pengkategorian dan pencarian informasi (taksonomi) serta content management yang memiliki fungsi untuk mengelolah informasi, baik terstruktur (*database*) maupun tidak terstruktur (dokumen, laporan hasil pelatihan dan pemanfaatan) dapat mendukung proses kombinasi tersebut.
4. Proses **internalisasi** merupakan perubahan dari *explicit knowledge* ke *tacit knowledge*. Semua dokumen, data, informasi dan knowledge yang sudah didokumentasikan baik berupa tercetak maupun elektronik yang bisa dibaca oleh orang lain, bisa meningkatkan knowledge sumber daya manusia karena didalamnya tim bisa melakukan aktivitas belajar mengenai informasi yang diduplikasinya tersebut. Untuk dapat mendukung proses internalisasi, dibutuhkan suatu sistem atau alat bantu pencarian dan pengambilan dokumen. *Content Management*, selain dapat mendukung proses kombinasi, juga dapat memfasilitasi proses internalisasi ini. Karena pemicu dalam proses ini adalah penerapan "*learning by doing*". Pengetahuan tertulis atau *explicit knowledge* yang didapat melalui pendidikan dan pelatihan bisa menjadi sumber pengetahuan atau *knowledge* para *stakeholders* terkait.

KEGIATAN BERBAGI PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE SHARING*)

Kegiatan berbagi pengetahuan dalam SEPAKAT dilakukan antara lain dengan cara:

1. **Informasi tentang kegiatan dan pemanfaatan SEPAKAT** dengan menggunakan beberapa media, yaitu: Peta Kegiatan SEPAKAT, Kalender kegiatan SEPAKAT dan dua platform media sosial Instagram dan Facebook SEPAKAT.
2. **Bagaimana mendapatkan Pelatihan SEPAKAT?** Dapat diakses pada dokumen yang menjelaskan tahapan-tahapan daerah yang ingin mendapatkan pelatihan SEPAKAT.
3. **Forum diskusi** dan bertukar pikiran atau pengalaman diantara tim SEPAKAT dengan berbagai daerah yang telah mendapatkan pelatihan maupun yang belum dapat dilakukan melalui platform Twitter SEPAKAT.
4. **Inovasi-inovasi daerah** dalam penanggulangan kemiskinan dapat diakses dalam menu Blog Inovasi. Daerah dapat proaktif untuk mengirimkan cerita inovasi penanggulangan kemiskinannya guna dimuat dalam menu ini.
5. **Pemanfaatan SEPAKAT** oleh daerah menjadi salah satu fitur dalam menu Pengetahuan. Tujuannya adalah agar daerah bisa saling belajar tentang bagaimana SEPAKAT dimanfaatkan oleh daerah dalam berbagai bentuk untuk mendukung dokumen yang disusun oleh daerah. Seperti misalnya dokumen RPJMD, SPKD dan Renja Daerah.
6. Untuk semakin mendekatkan SEPAKAT dengan pengguna dan memudahkan daerah untuk mengakses SEPAKAT, akan dibentuk **Regional Knowledge Center (RKC)** di beberapa daerah. RKC adalah gabungan berbagai lembaga yang ada di daerah meliputi Perguruan Tinggi, Lembaga Kajian (Riset) dan Organisasi Non-Pemerintah di daerah yang memiliki konsen dalam penanggulangan kemiskinan. RKC nantinya akan berfungsi dalam memberikan pelatihan SEPAKAT kepada daerah, memberikan pendampingan teknis dalam rangka pemanfaatan SEPAKAT dalam penyusunan dokumen-dokumen daerah, penelitian penanggulangan kemiskinan, tempat berbagi informasi dan pemutakhiran data SEPAKAT.
7. **Riset Kemiskinan** adalah fitur dalam menu Pengetahuan yang digunakan untuk mendokumentasikan berbagai penelitian terkait dengan penanggulangan kemiskinan, baik yang dilakukan oleh RKC maupun oleh berbagai pihak lainnya. Tujuannya adalah untuk saling berbagi analisis antar lembaga terkait tentang hasil riset kemiskinan dan bisa menjadi rujukan dasar pengambilan kebijakan.
8. Fitur bantuan disediakan juga dalam SEPAKAT dalam bentuk **Frequently Asked Questions (FAQs)** dan WikiSEPAKAT. Tujuan dari kedua fitur ini adalah membantu pengguna SEPAKAT apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti berkaitan dengan istilah-istilah dan berbagai hal yang menjadi pertanyaan terkait SEPAKAT.

KEGIATAN PENERAPAN PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE IMPLEMENTING*)

Kegiatan penerapan knowledge management SEPAKAT dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap evaluasi secara berkala infrastruktur SEPAKAT yang sudah tersedia, dan berusaha menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi;
2. Tahap merancang desain, menilai infratsruktur SEPAKAT yang sudah ada, menilai pengetahuan-pengetahuan yang ada, mengembangkan SEPAKAT dan merancang pengembangannya;
3. Tahap pengembangan yang terdiri dari penyebaran KM, penerapan metodologi SEPAKAT serta mengelola dan menyusun perubahan;
4. Tahap evaluasi, dengan mengevaluasi kinerja dan dampak SEPAKAT bagi para penggunanya serta perbaikan atau pengembangan KMS.

Untuk E-Book, silahkan unduh
melalui tautan berikut:



<http://bit.ly/pengantarsepakat>

ISBN 978-602-52841-5-1



SEPAKAT

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, ANALISIS,
PEMANTAUAN & EVALUASI KEMISKINAN TERPADU